



LAPORAN KINERJA *2024*

TRIWULAN I

**Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**



KATA PENGANTAR



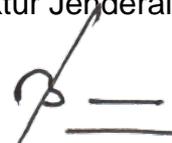
Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2024 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan di dalam negeri dan ekspor. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP periode Triwulan I tahun 2024 capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 104,69 yang termasuk kategori Organisasi Berkinerja Baik.

Akhir Kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah diamanatkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dalam pelaksanaan program/kegiatan, saya percaya dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 29 April 2024

Direktur Jenderal PDSPKP



Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Yayuk Sukarsih

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Muqaramah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Berdasarkan PK tersebut, terdapat 23 indikator kinerja yang terdiri dari 8 Indikator bersifat triwulanan, dua bersifat semesteran, dan 13 bersifat tahunan.

Sebanyak 23 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2024. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2024 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 104,69%, dan termasuk ke dalam kategori Organisasi Berkinerja Baik.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. 13 indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Volume Produk Olahsan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, (2) Konsumsi Ikan, (3) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), (4) Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP, (5) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP, (6) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP, (7) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP, (8) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, (9) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP, (10) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP, serta (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.
2. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.
3. Delapan indikator kinerja yang bersifat triwulanan dengan persentase capaian terhadap target triwulan I tahun 2024 yaitu :

- a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan capaian 86,83%;
 - b. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan dengan capaian 110,87%;
 - c. Kinerja Logistik Hasil Perikanan dengan capaian 104,09%;
 - d. Pembiayaan Usaha KP melalui Kredit Program dengan capaian 94,12%;
 - e. Nilai PNBPDitjen PDSPKP dengan capaian 131,05%;
 - f. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP dengan capaian 108,86%;
 - g. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP dengan capaian 125%;
 - h. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dengan capaian 133,33%.
4. Dua indikator kinerja yang belum mencapai target triwulan I tahun 2024 yaitu nilai ekspor hasil perikanan dengan persentase capaian 86,83% terhadap target Triwulan I Tahun 2024 dan Pembiayaan Usaha KP melalui kredit program persentase dengan Capaian 94,12% terhadap target Triwulan I Tahun 2024.
5. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp386.899.151.000,00. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp69.879.655.000,00. sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp317.019.496.000,00. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar Rp50.242.691.000,00 atau setara dengan 15,85% terhadap total pagu anggaran awal atau 12,99% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
TIM PENYUSUN.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	5
E. Permasalahan Utama.....	5
F. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja.....	16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	18
1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	18
Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat	24
2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan.....	24
3. Konsumsi Ikan	33
Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan	38
4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan.....	38
5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan.....	44
6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	53
7. Nilai PNBPN Ditjen PDSPKP	58
8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP.	59
Sasaran 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat.....	61
9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP).....	61
Sasaran 5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP.....	64
10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP	64
11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	67
12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	69
13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	71
14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	75

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	78
16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	79
17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	82
18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	83
19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	85
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP	87
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP	89
22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP.	91
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	93
C. Realisasi Anggaran	96
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Permasalahan dan Rekomendasi	99
C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023.....	100
LAMPIRAN	106
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024.....	14
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2024.....	16
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	19
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan	24
Tabel 5. Capaian Ekspor Periode Triwulan 1 tahun 2023-2024	24
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan I Tahun 2024	25
Tabel 7. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan I Tahun 2024.....	25
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan	33
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.....	39
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan	46
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program.....	54
Tabel 12. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024	55
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBPK Ditjen PDSPKP	59
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP.....	60
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	62
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP.....	65
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	67
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	69
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	71
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	76
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	78
Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	80
Tabel 23. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	83
Tabel 24. Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	84
Tabel 25. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP.....	86

Tabel 26. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP	87
Tabel 27. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP	90
Tabel 28. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	92
Tabel 29. Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSP	94
Tabel 30. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan I Tahun 2024	97
Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2024	97
Tabel 32. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan I Tahun 2024	99
Tabel 33. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2024	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	3
Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP	5
Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2024	5
Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024 ..	9
Gambar 5. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024.....	16
Gambar 6. Penyusunan Roadmap Akselerasi Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan	20
Gambar 7. Penyiapan Bahan RSNI Hasil Kelautan dan Perikanan	21
Gambar 8. Peta Sebaran Lokasi Produk KP yang Disertifikasi periode TW I Tahun 2024.....	22
Gambar 9. Pengembangan Produk Usaha KP dalam Inkubasi Bisnis Invapro KP ..	23
Gambar 10. Fasilitas pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP...	23
Gambar 11. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan I Tahun 2024	26
Gambar 12. Pengembangan/Pengelolaan Sistem Bursa Pasar Ikan	29
Gambar 13. Rapat Koordinasi Lintas KL dan tinjauan pengelolaan di kantor Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.....	32
Gambar 14. Promosi Skala Internasional Seafood Expo North America (SENA) 202	33
Gambar 15. Pembahasan dan Pengolahan Raw Data Susenas Konsumsi Ikan Tahun 2023	34
Gambar 16. Pembahasan Identifikasi dan pengambilan data profil komoditas unggulan	35
Gambar 17. Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)	36
Gambar 18. Koordinasi persiapan Pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri	36
Gambar 19. Pelaksanaan Identifikasi calon lokasi Kalamo di Kabupaten Manggarai Barat Desa Warloka Pesisir.....	37
Gambar 20. Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan.....	38
Gambar 21. Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan 1 Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)	40
Gambar 22. Kegiatan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.....	41
Gambar 23. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Lokasi Prioritas	41
Gambar 24. Kegiatan Pemetaan Peluang investasi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.....	42
Gambar 25. Kegiatan Pemetaan Peluang investasi di Nusa Tenggara Barat.....	42
Gambar 26. Kegiatan Identifikasi dan Koordinasi Potensi Investasi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan	43
Gambar 27. Kegiatan Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024	42

Gambar 28. Kegiatan Pendampingan rencana Investasi PT. Indo Rama.....	44
Gambar 29. Kegiatan Pendampingan rencana Investasi PT. Krueng Triton Indones	44
Gambar 30. Sosialisasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan Pelatihan Rantai Pengawasan atau of Custody... ..	47
Gambar 31. Rapat Koordinasi Data Cold Storage Lingkup Direktorat Logistik.....	47
Gambar 32. Rapat Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program Prioritas KKP.....	48
Gambar 33. Rapat Pembahasan Penyiapan Naskah Akademik Regulasi PenguatanEkosistem Logistik Ikan Nasional.....	49
Gambar 34. Rapat Pembahasan Integrasi Akun Sistem Inhouse NK Perikanan dan Pembahasan Pengembangan Sistem Inhouse NK Perikanan	49
Gambar 35. <i>Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan</i>	50
Gambar 36. Identifikasi calon Lokasi Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portable..	51
Gambar 37. Pembahasan usulan revisi juknis bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024 dan Penyusunan Pedoman Verifikasi Dan Validasi Calon Penerima Kendaraan Refrigerasi.....	52
Gambar 38. Identifikasi Calon Pengelola Sistem Resi Gudang.....	52
Gambar 39. Pertemuan dan Persiapan Perencanaan Teknis Kapal Angkut Ikan.....	53
Gambar 40. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024.....	55
Gambar 41. Pendampingan Penguatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak.....	56
Gambar 42. Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	57
Gambar 43. Fasilitas Akses Permodalan di Semarang dan Boyolali	58
Gambar 44. Fasilitas Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Gresik dan Purwakarta	58
Gambar 45. Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP.....	61
Gambar 46. Koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait Calon Lokasi Sarana Pascapanen di Kampung Perikanan Budidaya	64
Gambar 47. Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 lingkup Ditjen PDSPKP	66
Gambar 48. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP Semester II Tahun 2023	66
Gambar 49. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP	67
Gambar 50. Kegiatan Pembahasan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP ..	68
Gambar 51. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Perencana.....	70
Gambar 52. Rapat Penyusunan AD/ART dan Kode Etik Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP	70
Gambar 53. Rapat Penyusunan Uraian Jabatan Tinggi Pratama lingkup Ditjen PDSPKP	71

Gambar 54. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran s.d Periode Triwulan IV Tahun 2023	72
Gambar 55. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	73
Gambar 56. Rekonsiliasi Dokumen Kinerja Ditjen PDSPKP.....	73
Gambar 57. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP .	73
Gambar 58. Dialog Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP	74
Gambar 59. Rapat Kerja Teknis Ditjen PDSPKP	74
Gambar 60. Verifikasi data Capaian kinerja Ditjen PDSPKP	75
Gambar 61. Kegiatan Penginputan Capaian Output Ditjen PDSPKP	87
Gambar 62. Rapat Koordinasi Percepatan PBJ Ditjen PDS dengan Pejabat Pengadaan dari Biro Umum dan PBJ.....	89
Gambar 63. Rapat Updating RUP dan Pencatatan LPSE (AMEL) di RR Discus Raiser Ikan.....	89
Gambar 64. Penyusunan Laporan Evaluasi/Program Ditjen PDSPKP	91
Gambar 65. Rapat Pemanfaatan BMN Ditjen PDSPKP	93
Gambar 66. Penguatan Pendataan dan Percepatan Validasi Data Bidang PDSPKP di Provinsi Kalimantan Barat	95
Gambar 67. Kegiatan Validasi Satudata KP Bidang PDSPKP Tahun 2023.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja

tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada Triwulan I Tahun 2024 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan,

- peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Usaha dan Investasi;
3. Direktorat Logistik;
4. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
5. Direktorat Pemasaran.



Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

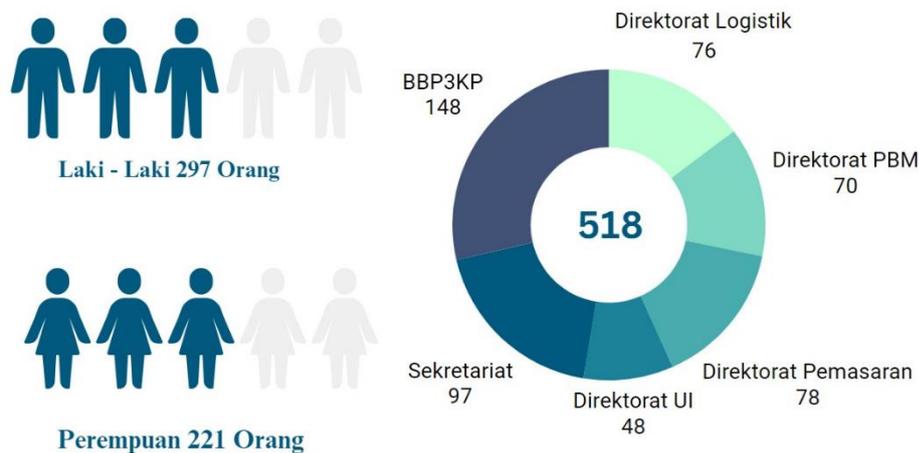
1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2 Struktur Organisasi BBP3KP

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2024 mencapai 518 orang yang terdiri dari 297 pegawai Laki-laki dan 221 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3 Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2024

E. Permasalahan Utama

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, tantangan peningkatan ekspor ikan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil, dan permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur

perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum *bankable* dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial. Beberapa pelaku usaha masih mengalami hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang *ready to offer* serta promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan *online* yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta yang belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada *ranking timeline* 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (*ranking* 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan *cold storage*, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, serta kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra

distribusi/pemasaran yang membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan Sistem Telusur Logistik Ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan IoT system.

Untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

1. Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
2. Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya *market share*);
3. Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
4. Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
5. Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor.

Ancaman *stunting* (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. *Stunting* timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas. Dalam hal pengembangan usaha skala mikro kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang dihasilkan masih rendah, sedangkan menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan

pengolahan. Hingga saat ini, jumlah usaha mikro kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1%.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klasterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor namun masih minim pembinaan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum

terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, dan *block chain* dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan *online* perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP				
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014				
BAB	BAB	BAB	BAB	BAB
01	02	03	04	05
Pendahuluan Menyajikan penjelasan umum tentang Ditjen PDSPKP, dengan penekanan kepada aspek strategis Ditjen PDSPKP	Perencanaan Kinerja Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024	Akuntabilitas Kinerja Menyajikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan IV Tahun 2024 dan analisisnya	Penutup Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Ditjen PDSPKP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya	Lampiran Menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lain yang dianggap perlu

Gambar 4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran Ditjen PDSPKP serta gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PDSPKP, maka dirumuskan visi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

VISI

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sejalan dengan visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen PDSPKP berupa upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

MISI

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Penguatan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, yaitu dengan berbagai upaya untuk :
 - Meningkatkan nilai investasi pada usaha kelautan dan perikanan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing

- (PMA) dan *joint venture*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kemitraan investasi, jumlah fasilitasi perizinan, ketertarikan terhadap promosi investasi, dan pemanfaatan paket investasi yang disediakan pemerintah;
- Mengembangkan usaha hasil kelautan dan perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan pembiayaan usaha, berkembangnya kemitraan inti plasma dan sejenisnya, meningkatnya penjangkauan akses debitur, pendampingan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*), tumbuhnya wirausaha baru, magang calon wirausaha, serta penguatan inkubator bisnis.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil kelautan dan perikanan, yaitu upaya pengembangan aktivitas logistik yang memiliki jaringan/konektivitas yang kuat di pusat produksi, pusat pengumpulan produk, pusat distribusi, dan pasar produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya struktur ekonomi pelaku logistik produk kelautan dan perikanan, kebutuhan dan ketersediaan produk yang lebih terjamin, sarana penyimpanan dan *buffer stock* hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi baik, sistem distribusi dan jasa logistik yang berjalan baik, tata niaga dan pengelolaan koridor logistik yang lebih baik;
 3. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri, merupakan upaya untuk :
 - Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas transaksi di pasar ikan modern, pasar ikan bersih, pasar ikan lokal, dan sentra kuliner, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan dan bazar produk perikanan, menyebarnya peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri, meningkatnya pemanfaatan alat dan sarana pemasaran ikan yang diberikan oleh pemerintah, berkurangnya penyakit akibat gizi buruk dan protein kurang, dan terjadinya penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai sarana;
 - Meningkatkan ekspor hasil perikanan, yang ditunjukkan dengan berkembangnya jaringan perdagangan internasional hasil perikanan baik

secara bilateral, regional maupun multilateral, dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan;

4. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah, yaitu berbagai upaya untuk:
 - Meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu baik pada UPI skala menengah besar maupun UPI skala mikro kecil, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku UPI, meningkatnya utilitas UPI, meningkatnya pengurusan sertifikat dan standar mutu pada UPI, dan berkembangnya aktivitas fasilitasi sarana prasarana pengolahan ikan;
 - Meningkatkan pengusahaan produk bernilai tambah, yang ditunjukkan dengan berkembangnya UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, berkembangnya UPI yang menggunakan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produk-produk inovasi yang bernilai tambah;
 - Menambah kepedulian terhadap kelayakan pengolahan di UPI, yang ditunjukkan dengan dirumuskannya standar kelayakan pengolahan hasil perikanan, penerbitan SNI produk kelautan dan perikanan, dan pengurusan SKP secara *online*.
5. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, yaitu upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan terpercaya yang ditunjukkan dengan dukungan manajemen yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSPKP, dukungan sarana dan prasarana internal yang mumpuni, layanan perkantoran yang cepat dan bersih.

Arahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada 4 (empat) bidang tersebut dijelaskan :

Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan (bidang usaha dan investasi). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-1 : Peningkatan investasi kelautan dan perikanan;
- Kebijakan PDSPKP-2: Pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil Kelautan dan perikanan (bidang logistik). Arahannya adalah :

- Kebijakan PDSPKP-3 : Pengembangan sistem logistik ikan dalam rangka konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor);

Meningkatkan ekspor hasil perikanan (bidang pemasaran). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-4 : Fasilitasi dan keikutsertaan Indonesia dalam forum dialog/persidangan skala internasional dan promosi terkait dengan produk perikanan Indonesia di pasar internasional;

Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting* (bidang pemasaran). Arahannya adalah :

- Kebijakan PDSPKP-5 : Fasilitasi dan pemberian bantuan pemerintah dan pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha dalam rangka peningkatan konsumsi makan ikan dan pengurangan *stunting* dalam masyarakat;

Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah (bidang pengolahan dan bina mutu). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-6 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala menengah besar;
- Kebijakan PDSPKP-7 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro kecil;
- Kebijakan PDSPKP-8 : Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah;
- Kebijakan PDSPKP-9 : Penerapan standar kelayakan pengolahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan review terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan

mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2023, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

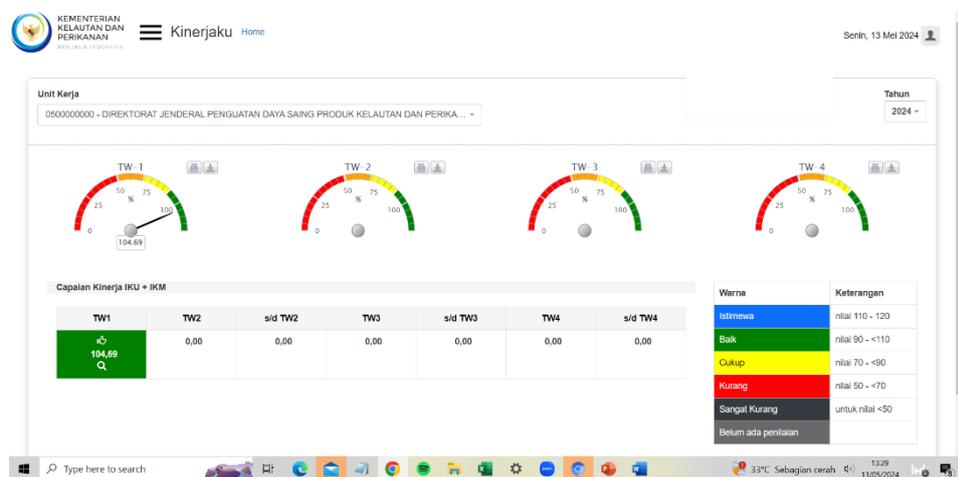
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,5
2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2
		3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	59
3	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000
4	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75
5	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	2
		11.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,3
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	87
		13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	84
		14.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		15.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		16.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	76
		17.	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		18.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	91

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Maret 2024. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 104,69 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 NKO Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi TW I 2024	Persentase terhadap Target (%)	
			Tahun 2024	TW I 2024
1 Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,5	-	-	-
2 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2	1,67	20,14	86,83
3 Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	59	-	-	-

	Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I 2024	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2024	TW I 2024		Tahun 2024	TW I 2024
4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9	2,3	2,55	28,33%	110,87%
5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9	70,43	73,31	101,96%	104,09%
6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26	1,7	1,6	15,59%	94,12%
7	Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62	1,9	2,49	32,68%	131,05%
8	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000	1735	1906	2,89%	109,86%
9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75	-	-	-	-
10	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	2	-	-	-	-
11	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)*	3,3	-	-	-	-
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	87	-	-	-	-
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	84	-	-	-	-
14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	-	-	-	-
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80	80	100	125,00%	125,00%
16	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	76	-	-	-	-
17	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133,33	141,84%	141,84%
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76	93,76	-	-	-

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I 2024	Persentase terhadap Target (%)	
	Tahun 2024	TW I 2024		Tahun 2024	TW I 2024
19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	86	-	-
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	80	80	-	-
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	80	80	-	-
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	80	80	-	-
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	91	91	-	-

*angka sementara

**angka prognosa

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk menyerap produksi perikanan dan kedua meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan dengan terintegrasikannya kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan, Jenis Kegiatan Pengolahan dibagi menjadi 13 yaitu: (1) Pendinginan/pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3)

Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggang ikan, (6) Peragian/fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/*jelly* ikan atau surimi, (9) Pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, (10) Pembuatan minyak ikan, (11) Pengolahan rumput laut, (12) Pengolahan lainnya, (13) Penanganan ikan.

Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	-	7,35	-	7,5	-	7,38*	-	-	-	100,41	-	-	-

*angka prognosa capaian 2024
Sumber Data: Ditjen PDSPKP

Volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 7,5 juta ton. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan 1 tahun 2024. Capaian Volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing pada tahun 2023 sebesar 7,38 juta ton. Capaian dimaksud setara dengan 100,41% terhadap target tahun 2023 sebesar 7,35 juta ton.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Volume produk olahan kelautan dan perikanan sebesar Rp27.568.609.000,- sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp1.879.733.673,00 atau setara dengan 6,82%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan Penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/ Sertifikat *good manufacturing practiprofillingce* (GMP) melalui Pelaksanaan Gerai SKP dan Penyusunan Roadmap Akselerasi Pembinaan Sistem

Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan periode triwulan I jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 1.047 sertifikat.



Gambar 6. Penyusunan Roadmap Akselerasi Pembinaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan

- b. Melaksanakan Profiling Industri pengolahan Hasil Perikanan antara lain Profiling Sebaran Industri Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil, sebaran UPI skala mikro dan kecil berbasis data UPI dari KUSUKA, skala usaha, volume/kapasitas produksi, jenis olahan, *losses* atau susut hasil, volume produk olahan tahun 2023, serta *success story* UPI binaan Ditjen PDSPKP menurut jenis kegiatan pengolahan.
- c. Pembangunan unit pengolahan ikan bernilai tambah yaitu tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai dengan triwulan I tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah reviu dokumen perencanaan dan penyiapan dokumen-dokumen lelang. Terkait konstruksi/Pembangunan masih pada proses identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Melaksanakan Pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala

Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Sampai dengan periode triwulan I telah tercapai 310 UMKM yang dibina di lokasi Kampar, Bogor, Depok, Karawang, Banyuwangi dan Makassar.

- e. Melaksanakan Pembinaan UPI skala menengah besar melalui koordinasi dan diskusi dengan asosiasi terkait dengan pengolahan ikan baik itu di sisi hulu sebagai pemasok bahan baku maupun konsumen sebagai penyerap produk. Sampai dengan periode triwulan I telah tercapai 40 UPI yang dibina.
- f. Penyiapan Bahan RSNI hasil KP terkait Persiapan Sidang *Codex Committee on Fats and Oils* (CCFO), Konsolidasi Penerapan Standar Nasional Indonesia, Sosialisasi Program Pendampingan Penerapan SNI dengan Dit. Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN dan Dit. Pengolahan dan Bina Mutu, koordinasi program perumusan SNI tahun 2024, *Refreshment* Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Non pangan pembahasan persiapan penyusunan bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP TA 2024 dan Focus Grup Discussion (FGD) penentuan *score sheet sensory* analisis untuk Bandeng Duri Lunak dan Ikan Renyah, dan pengumpulan data dan informasi bahan RSNI Bandeng Duri Lunak, Kerupuk Ikan, Udang dan Moluska, Ikan Renyah, dan uji coba penerapan RSNI metode uji Sn secara HG-AAS pada tanggal 15 Februari 2024.



Gambar 7 Penyiapan Bahan RSNI Hasil Kelautan dan Perikanan

- g. Pemberian layanan sertifikasi SNI dan pengujian produk kelautan dan perikanan sebagai upaya penjaminan mutu serta peningkatan daya saing produk olahan. Untuk triwulan I tahun 2024, capaian kegiatan jumlah produk

kelautan dan perikanan yang disertifikasi dan diuji sebanyak 177 produk dari target 130 produk, dengan rincian 29 produk yang disertifikasi dan 148 produk yang diuji.



Gambar 8 Peta Sebaran Lokasi Produk KP yang Disertifikasi periode TW I Tahun 2024

- h. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui dua kegiatan: (a) Pencetakan media informasi berupa panel dan desain dari Timja Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran dalam rangka mendukung acara peresmian Kegiatan Kampung Nelayan Modern di Pulau pasaran dan leaflet berjudul “Diversifikasi Produk Olahan Berbahan Dasar Tuna” dan booklet “Design Layout Miniplant Tuna”, (b) Penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi sampai dengan Triwulan I dilakukan pada 8 event diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan yaitu di Gedung Mina Bahari III Kota Jakarta; Raiser Ikan Hias Cibinong Kab.Bogor; Workshop Pengembangan Produk BBP3KP Jakarta Timur; Monumen Nasional Jakarta; dan Cibubur dengan total penerima informasi sampai dengan bulan Maret yaitu 238 orang;
- i. Pengembangan Usaha Produk Kelautan dan Perikanan dalam Inkubasi Bisnis Invapro KP pada triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan berupa Penetapan tenant Inkubasi Bisnis Invapro KP melalui surat penetapan tenant Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan nomor B.39/BBP3KP/PDS.440/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, bimbingan teknis, pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha tenant inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan tahun 2024, Fasilitasi dan

pendampingan manajemen usaha tenant inbis invapro KP mengenai BMC (*Business Model Canvas*) dan Rapat hasil uji organoleptik 6 (enam) tenant inbis invapro KP tahun 2024;



Gambar 9 Pengembangan Produk Usaha KP dalam Inkubasi Bisnis Invapro KP

- j. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP pada triwulan I Tahun 2024 telah dilaksanakan berupa (1) Penyusunan SK Tim Kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; perbaikan *form* penunjang kegiatan guna kelengkapan data dan informasi calon penerap pengembangan produk bernilai tambah seperti *form* profil pelaku usaha, pernyataan kebenaran informasi; penilaian komitmen dan rencana pengembangan dan evaluasi keberhasilan pada fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan pembahasan *draft* juknis; (2) Penyampaian surat usulan pengolah UMKM untuk peserta kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan tahun 2024 ke 24 Dinas KP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia (3) identifikasi dan verifikasi data UMKM calon penerap PPNT kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.



Gambar 10 Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP

Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4 Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai ekspor Hasil Perikanan (USD milyar)	1.67	6.77	1.56	7.2	1,45*	5.63	1.36	1,45*	86,83	83.16	87.18	20,14	6,78

*angka sementara s.d Bulan Maret 2024
Sumber Data: BPS (diolah Ditjen PDSPKP)

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia Triwulan I tahun 2024 mencapai USD 1,45 miliar (angka sementara). Capaian tersebut setara dengan 20,14% terhadap target tahun 2024 (USD 7,2 miliar). Jika dibanding target jangka menengah tahun 2024 (USD 7,2 miliar), maka capaian ini telah mencapai 86,83%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023 yakni USD 1,56 miliar, maka capaian Triwulan I tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 6,78%.

Tabel 5 Capaian Ekspor Periode Triwulan 1 tahun 2023-2024

BULAN	Volume (Ribu ton)		Nilai (USD.Juta)	
	2023	2024*	2023	2024*
Jan	92.06	121.73	442.59	527.71
Feb	86.90	97.18	414.99	429.49
Mar	105.88	137.74	503.20	494.90
TOTAL	284.84	357.10	1,360.79	1,453.04

*angka sementara s.d Bulan Maret 2024
Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Pada periode yang sama, ekspor non migas mengalami penurunan sebesar 7,53% dan ekspor Indonesia secara keseluruhan juga mengalami penurunan sebesar 7,25% (BPS, 2024). Nilai ekspor hasil perikanan Triwulan I tahun 2024 berkontribusi sebesar 2,09% terhadap nilai ekspor nasional sebesar USD62,2 miliar (angka sementara) atau 2,23% terhadap nilai ekspor non migas Triwulan I tahun 2024 yakni sebesar USD 58,3 miliar (BPS, April 2024).

Tabel 6 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan I Tahun 2024

Jenis Komoditas	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
Udang	74.638.682	20,9	386.638.251	26,6
Cumi-Sotong-Gurita	51.420.097	14,4	248.226.979	17,1
Tuna-Tongkol-Cakalang	57.179.086	16,0	231.943.768	16,0
Rumput Laut	64.005.164	17,9	87.872.771	6,1
Rajungan-Kepiting	11.640.660	3,3	148.652.727	10,2
Lainnya	97.770.154	27,4	348.760.861	24,0
Total	356.653.843		1.452.095.357	

*angka sementara s.d Bulan Maret 2024
Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

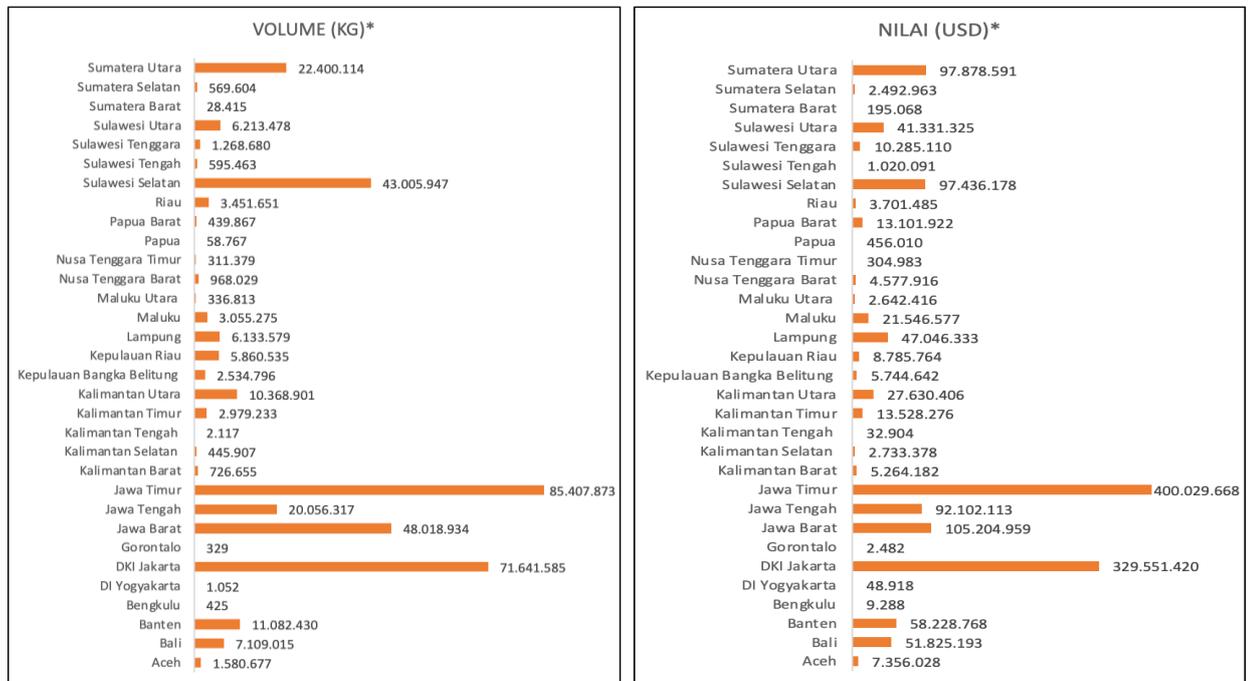
Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat 5 jenis komoditas utama ekspor dari Indonesia antara lain udang, tuna-tongkol-cakalang, cumi-sotong-gurita, rumput laut, dan rajungan-kepiting. Selain 5 jenis komoditas utama tersebut, terdapat komoditas lainnya meliputi mutiara, tilapia, ikan hias, sarden, kerapu, layur, surimi, hati-telur ikan, dan sebagainya dengan kontribusi 24,0% atau USD 348,76 juta.

Tabel 7 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan I Tahun 2024

Negara Tujuan	Volume (Kg)*	%	Nilai (USD)*	%
United States	52.487.395	14,7	462.906.744	31,9
China	120.078.436	33,7	319.149.270	22,0
ASEAN	61.839.616	17,3	187.653.564	12,9
Japan	53.076.735	14,9	152.443.454	10,5
Uni Eropa	19.201.392	5,4	102.521.581	7,1
Timur Tengah	8.747.062	2,5	35.581.226	2,5
Lainnya	41.223.207	11,6	191.839.517	13,2
Total	356.653.843		1.452.095.357	

*angka sementara s.d Bulan Maret 2024
Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Berdasarkan negara tujuan, nilai ekspor produk perikanan terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar USD 462,91 juta (31,9%), China sebesar USD 319,15 juta (22,0%), ASEAN sebesar USD 187,65 Juta (12,9%), Jepang sebesar USD 152,44 Juta (10,5%), Uni Eropa sebesar USD 102,52 Juta (7,1%), dan Timur Tengah sebesar USD 35,58 Juta (2,5%).



*angka sementara s.d Bulan Maret 2024
Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 11 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan gambar 13 diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor hasil perikanan terbesar yaitu (1) Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 27,55%, (2) Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 22,70%, dan Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 6,74%.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan Triwulan I tahun 2024 antara lain :

- a. Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun. Berdasarkan data BPS tahun 2024 tercatat total nilai ekspor Indonesia pada Januari – Maret 2024 mencapai

USD 1,45 miliar, naik 6,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar USD 1,36 miliar.

b. Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Adapun rincian penurunan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar AS sebagai berikut :

- 1) Total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS hingga Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 3,65% menjadi USD 462,91 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 480,45 juta. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor perikanan Indonesia ke AS tahun 2022 sebesar USD 727,27 juta pada periode yang sama, dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi di pasar AS belum sepenuhnya pulih:
- 2) Nilai ekspor udang pada triwulan I tahun 2024 sebesar USD 242,35 juta, turun sebesar USD 55,77 juta (-17,88%) dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Bandingkan dengan nilai ekspor udang triwulan I tahun 2022 sebesar USD 457,51 juta;
- 3) Nilai ekspor rajungan-kepiting pada triwulan I tahun 2024 sebesar USD 104,20 juta, naik sebesar USD 39,14 juta (60,16%) dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Bandingkan dengan nilai ekspor rajungan-kepiting triwulan I tahun 2022 sebesar USD 135,52 juta;
- 4) Nilai ekspor tuna-cakalang-tongkol pada triwulan I tahun 2024 sebesar USD 48,46 juta, naik sebesar USD 2,18 juta (4,70%) dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Bandingkan dengan nilai ekspor tuna-cakalang-tongkol triwulan I tahun 2022 sebesar USD 61,94 juta;
- 5) Nilai ekspor cumi-sotong-gurita pada triwulan I tahun 2024 sebesar USD 9,17 juta, naik sebesar USD 3,13 juta (51,75%) dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Bandingkan dengan nilai ekspor cumi-sotong-gurita triwulan I tahun 2022 sebesar USD 11,50 juta;
- 6) Nilai ekspor rumput laut pada triwulan I tahun 2024 sebesar USD 2,54 juta, turun sebesar USD 796,32 ribu (-23,90%) dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Bandingkan dengan nilai ekspor rumput laut triwulan I tahun 2022 sebesar USD 5,17 juta. (Sumber data: Ditjen PDSPKP diolah dari Trademap.org)

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan periode ke depan, antara lain:

- a. Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial;
- b. Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya;
- c. Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan *Anti-dumping*.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar Rp12.600.000.000,- sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp1.222.894.000,00 atau setara dengan 9,71%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan IV Tahun 2024, antara lain:

- a. Pengembangan/Pengelolaan Sistem Bursa Pasar Ikan;

Pengembangan sistem informasi berupa bursa pasar ikan merupakan sistem berbasis *website* yang dapat mengakses aplikasi tanpa perlu mengunduh melalui alamat <https://bursaikan.kkp.go.id/>. Peran bursa pasar ikan adalah memberikan fasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi poklahaar UKM dan Non-UMKM terkait persyaratan dan prosedur ekspor. Ditjen PDSPKP mendorong hilirisasi dengan target agar UMKM dapat naik kelas dan mampu melakukan ekspor produk kelautan dan perikanan. Selain itu pada tahun 2023, telah dilakukan pengembangan pada aplikasi ini berupa menu input data untuk mengakomodir pendataan terkait angka konsumsi ikan periode bulanan dan Pada tanggal 29 Januari 2024, telah dilakukan koordinasi terkait pengelolaan dan bisnis proses sistem informasi bursa ikan dengan tim pengembang website (PT. Pro Sistimatika Automasi) dalam rangka simulasi entri data angka konsumsi ikan. Berdasarkan hasil pembahasan dan simulasi entri data, pengembangan menu input data tersebut masih memerlukan penyempurnaan dan pembahasan lebih lanjut.



Gambar 12 Pengembangan/Pengelolaan Sistem Bursa Pasar Ikan

- b. Pelaksanaan Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor melalui serangkaian kegiatan :
- 1) Koordinasi dalam rangka membahas *draft Operational Procedure* Protokol Perubahan Indonesia Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) pada 19 dan 24 Januari 2024, serta 21 Maret 2024. Diharapkan dengan disepakatinya Protokol Perubahan IJEPA ini dapat meningkatkan akses pasar tuna kaleng Indonesia ke Jepang yang saat ini masih dikenakan tarif 9,6%.
 - 2) Koordinasi dalam rangka Perundingan *Indonesia-European Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan. Uni Eropa berkomitmen akan menghapus/mereduksi 530 pos tarif produk perikanan Uni Eropa sambil melihat apakah kepentingan Uni Eropa pada sektor lain dapat diakomodir oleh Indonesia. Namun demikian, KKP saat ini masih meminta dibukanya 15 pos tarif produk olahan yang hingga saat ini belum ditawarkan oleh Uni Eropa, diantaranya tuna dan sarden kaleng serta beberapa ikan olahan lainnya. Disamping akses pasar perdagangan barang, Ditjen PDSPKP juga turut mengawal perundingan dalam *Working Group Trade and Sustainable Development* dan *Sustainable Food System*.
 - 3) Koordinasi dalam rangka Perundingan *Indonesia-Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEAEU CEPA). EAEU beranggotakan Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, and Kyrgyzstan yang berpotensi menjadi alternatif pasar non-tradisional produk perikanan Indonesia. Direktorat Pemasaran telah menyampaikan *request list* dengan prioritas komoditas udang, kepiting/rajungan dan beberapa produk *fillet* untuk dibuka akses pasarnya ke negara EAEU.

- 4) Koordinasi dalam rangka Perundingan *Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement* (ICA CEPA). Ditjen PDSPKP melakukan penyusunan *initial request* kepada Kanada untuk pos tarif produk perikanan yang masih dikenakan tarif MFN (sekitar 3 – 9%), diantaranya kepiting/rajungan, ikan olahan asap, olahan kekerangan, olahan makarel, dan mutiara.
- 5) Koordinasi dalam rangka Perundingan *Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement* (IT-PTA). Tunisia meminta beberapa produk perikanan yaitu HS 0306.33.10, 0306.33.90, 0804.10.00.031, dan 1602.10.20.
- 6) Koordinasi dalam rangka Perundingan *Indonesia Mauritius Preferential Trade Agreement*. Sektor perikanan menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas Mauritius, namun pasca Putaran ke-4, KKP baru membuka akses pasar untuk tepung ikan yang saat ini tarif bea masuk umumnya memang 0%.
- 7) Koordinasi dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait rencana Pembangunan *Hub* Bisnis Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan di Timur Tengah yang bertujuan sebagai tempat/wadah/lokasi/*platform* yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses ekspor perikanan Indonesia, mulai dari pembudidaya ikan, pengolah ikan, eksportir, hingga pembeli di luar negeri. Pasar Timur Tengah memiliki potensi yang besar untuk produk KP mengingat adanya kebiasaan masyarakat yang gemar makan *seafood*, pasar haji dan umroh, serta sebagai *hub* masuk ke pasar Eropa.
- 8) Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan *Anti-dumping*. Hasil keputusan *Preliminary Negative Determination* Investigasi CVD produk udang pada tanggal 25 Maret 2024 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan subsidi yang dilarang kepada produsen dan eksportir udang beku Indonesia dengan nilai de minimis. Ketentuan pengenaan bea masuk anti-subsidi ini akan berlaku apabila telah ada keputusan U.S. *International Trade Commission* (USITC) yang menyatakan terdapat kausalitas antara *injury* udang domestik AS disebabkan udang impor. Jika tidak ada kausalitas, maka pengenaan bea masuk anti-subsidi tersebut tidak berlaku.

- 9) Menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi petisi pengenaan anti-dumping dan tindakan pengimbang (*countervailing duties*) terhadap produk *Frozen Warmwater Shrimp* yang berasal dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam yang disampaikan oleh asosiasi udang di Amerika Serikat. Rapat intensif melibatkan Kementerian Perdagangan, unit teknis Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, asosiasi-asosiasi terkait udang dan kuasa hukum yang ditunjuk.
 - 10) Menginisiasi koordinasi dengan BP2MHKP dalam rangka penanganan hambatan ekspor mengingat terdapat beberapa *pending issues*, seperti terhambatnya *approval number* eksportir baru ke Uni Eropa dan Rusia, tindak lanjut hambatan ekspor ke China, serta registrasi produk *catfish* ke Amerika Serikat dan mengantisipasi rencana implementasi FDA's *Food Traceability Rule* di pasar Amerika Serikat.
- c. Penyusunan Profil Ekspor hasil kelautan perikanan pada tahun 2024 meliputi Profil Pasar udang, Profil pasar Tuna, Profil Pasar Tilapia dan Profil Pasar Rumput Laut. Pada tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan *market review* terhadap profil pasar Tuna dan tanggal 15 Maret 2024 telah dilakukan *market review* profil pasar udang. Selain itu profil pasar Udang, Kepiting Rajungan, Lobster, Rumput Laut dan Tilapia yang merupakan output pada tahun 2023 telah disampaikan kepada unit kerja KKP dan *stakeholder* terkait pada kegiatan Rapat Kerja Teknis Terpadu Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 Maret 2024.
- d. Penyusunan Rekomendasi kebijakan pendampingan *major project* pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pada periode triwulan I tahun 2024 telah melakukan beberapa kegiatan:
- 1) Pelaksanaan tinjauan pengelolaan dan koordinasi dalam mewujudkan Pelabuhan Terintegrasi *Fish Market* Bertaraf Internasional di Likupang II

Kabupaten Minahasa Utara. Tanggal 29 s.d 31 Januari 2024 dan pendampingan dalam penyusunan pra FS untuk pembangunan pasar ikan bertaraf internasional (rekomendasi kebijakan).



Gambar 13 Rapat Koordinasi Lintas KL dan tinjauan pengelolaan di kantor Bupati Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah

- 2) Pelaksanaan Kegiatan koordinasi dan konsultasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Pembangunan *International Fish Market* di Likiep Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 28 s.d 29 Februari 2024 di Direktorat Jenderal Ruang Laut dan Direktorat Pemasaran.
 - 3) Penyampaian informasi Nota Dinas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, tanggal 25 Maret 2024 Perihal Permohonan Masukan atas Draf EN, RoD, dan NV untuk *Loan Integrate Fishing Port and International Fish Markets Phase I*
- e. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional pada periode Januari – Maret yang telah dilaksanakan antara lain :
- 1) Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial salah satunya yaitu keikutsertaan dalam pameran *seafood expo North America* pada tanggal 10 - 12 Maret 2024. Nilai potensi transaksi yang dihasilkan dalam pameran tersebut adalah sebesar USD 58,47 juta atau 17% di atas target yang ditetapkan sebesar USD 50 Juta dengan produk yang diminati diantaranya adalah tuna (loin, frozen, saku), udang (*breaded, frozen*), octopus, barramundi, cumi, kakap, tilapia, mahi-mahi, dan ikan lainnya.



Gambar 14 Promosi Skala Internasional Seafood Expo North America (SENA) 2024

- 2) Penganjangan Tahun Tuna Indonesia 2024 yang merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat daya saing komoditas tuna di pasar global dan domestik serta mengajak publik untuk bangga dan makin gemar mengonsumsi tuna. Penganjangan ini diharapkan mampu memperluas pangsa pasar baik internasional dan dalam negeri, salah satunya melalui kegiatan promosi di dalam dan luar negeri, dengan beberapa kegiatan seperti, Sosialisasi dan informasi tentang tuna, Promosi Brand Tuna, *Business Gathering*, *tuna talks*, serta mengutamakan komoditas tuna pada pameran internasional.

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jenis dan jumlah ikan yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS. Penghitungan konsumsi ikan nasional merupakan angka konsumsi ikan per kapita (secara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode satu tahun.

Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	-	57,61	-	59	-	57,61	-	-	-	100	-	-	-

*Angka sementara

Konsumsi ikan tahun 2024 ditargetkan sebesar 59,00 kg/kapita/tahun. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan 1 tahun 2024. Capaian Konsumsi Ikan pada tahun 2023 sebesar 57,61 kg/kap. Capaian dimaksud setara dengan 100% terhadap target tahun 2023 sebesar 57,61 kg/kap.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja konsumsi Ikan dan perikanan sebesar Rp63.848.865.000,- sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp14.302.622.562.000,00 atau setara dengan 22,40%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian indikator kinerja konsumsi ikan antara lain:

- a. Penyusunan profil dalam negeri kelautan perikanan dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - 1) Pengolahan *raw data* Susenas 2023 untuk memperoleh konsumsi ikan di dalam rumah tangga baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota selanjutnya dilakukan pembahasan reformulasi penghitungan angka konsumsi ikan melibatkan Badan Pusat Statistik, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Institut Pertanian Bogor, Eselon I lingkup KKP (Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Pusat Data Statistik dan Informasi, Ditjen Perikanan Tangkap, dan Ditjen Perikanan Budi Daya), serta Eselon II lingkup PDSPKP.



**Gambar 15 Pembahasan dan Pengolahan Raw Data Susenas
Konsumsi Ikan Tahun 2023**

- 2) Identifikasi dan pengambilan data profil komoditas unggulan pada tanggal 21-23 Februari 2024 di beberapa lokasi (1) Kecamatan Paciran dan Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Terdapat lima komoditas unggulan yang dilaporkan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023, yaitu udang vaname, ikan

bandeng, ikan nila, ikan lele dan ikan tawes. (2) Lokasi Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat Kelompok Pengasapan Ikan Laut berada di Sentra Pengasapan Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Jumlah kios pedagang ikan asap tersebut sebanyak 76 kios pedagang. Ikan asap yang ditawarkan diantaranya ikan manyung, ikan semar, ikan lele, ikan pari, dan ikan kembung. Bahan baku ikan asap biasanya dari Provinsi Papua, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 16 Pembahasan Identifikasi dan pengambilan data profil komoditas unggulan

- b. Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan). Pada Triwulan I Tahun 2024, pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) telah tercapai 35 promosi. Adapun kegiatan promosi yang telah dilaksanakan yaitu : Perluasan Safari Gemarikan sebanyak 30 titik di beberapa kab/kota antara lain Jakarta, Bogor, Pinrang, Merauke, Sumbawa, Blitar, Kediri, Tulungagung, Jombang, Bekasi, Karawang, Bima, Sumbawa, Aceh Tamiang, Bireuen, Lhokseumawe, Serang, Solok, Dharmasraya, Padang, Aceh Tenggara, Sumedang, Majalengka, Subang, Mamuju, Cirebon, Magelang, Lampung Tengah, Lampung Timur. Bazar Produk Perikanan sebanyak 4 promosi dan Promosi Medsos Gemarikan sebanyak 1 promosi.



Gambar 17 Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)

- c. Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI dan BBWI) di Provinsi Maluku dengan mengundang Eselon I lingkup KKP, Eselon II lingkup PDSPKP, Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Maluku serta mitra terkait dalam rangka mendukung kegiatan promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri.



Gambar 18 Koordinasi persiapan Pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri

- d. Pembangunan sentra kuliner ikan. Sentra kuliner merupakan bantuan Pemerintah berupa bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pemasaran kuliner dan pusat oleh-oleh berbahan baku ikan. Pembangunan sentra kuliner tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern (1) Desa Setono, Kota Pekalongan (2) Desa Lateng, Kabupaten Banyuwangi (3) Desa Bulumeduro, Kabupaten Tuban (4) Desa Pasarbangi,

Kabupaten Rembang (5) Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi (6) Desa Cikiruhwetan, Kabupaten Pandeglang (7) Desa Warloka Pesisir, Kabupaten Manggarai Barat (8) Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe (9) Desa Kuala Raja, Kabupaten Bireuen (10) Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur. Sampai dengan periode triwulan I Ditjen PDSPKP telah melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka identifikasi dan *feasibility* mendukung program penataan kampung nelayan modern.



Gambar 19 Pelaksanaan Identifikasi calon lokasi Kalamo di Kabupaten Manggarai Barat Desa Warloka Pesisir

- e. Melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan pasar ikan pada 15 lembaga pasar ikan periode Januari - Maret 2024 di Pasar Kemiri Muka Depok, Pasar Pal/Tugu Depok, Pasar Cisalak Depok, Pasar Serpong, Pasar Bintaro sektor II Tangerang Selatan, Pasar Baru Bekasi, Pasar Ikan Modern Muara Baru, Pasar Ciluar Kabupaten Bogor, Pasar Cikema Kabupaten Bogor, Pasar Cibinong Kabupaten Bogor, Pasar Merdeka Bogor, Pasar Baru Bogor, Pasar Kebon Kembang Bogor, Pasar merdeka. Bentuk kegiatan pembinaan lembaga pengelola pasar ikan ini adalah sosialisasi dalam rangka penerapan SOP pasar ikan yang memenuhi standar sehat, bersih, aman dan nyaman serta memenuhi kaidah sanitasi dan higienis. SOP yang disosialisasikan antara lain pengelolaan pasar, cara berjualan ikan yang baik, kesehatan dan kebersihan pribadi pelaku pasar dan pedagang ikan, pembersihan dan sanitasi tempat berjualan ikan, pengelolaan limbah/sampah, pembongkaran ikan segar di area pasar ikan, cara memajang (*display*) ikan segar dan penyimpanan ikan.



Gambar 20 Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan

- f. Pengadaan Peralatan Pemasaran. Peralatan pemasaran merupakan Bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat dalam hal ini koperasi/keompok perikanan berupa *cool box* guna mendukung distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Pada Tahun 2024 Ditjen PDSPKP mengalokasikan sebanyak 6.000 unit sarana pemasaran *cool box*. Sampai dengan periode triwulan I tahun 2024 Ditjen PDSPKP telah melakukan identifikasi, verifikasi calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan dan koordinasi dengan tenaga ahli komisi IV DPR RI dalam rangka percepatan pengadaan bantuan sarana pemasaran (*cool box*).

Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan

4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas

unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

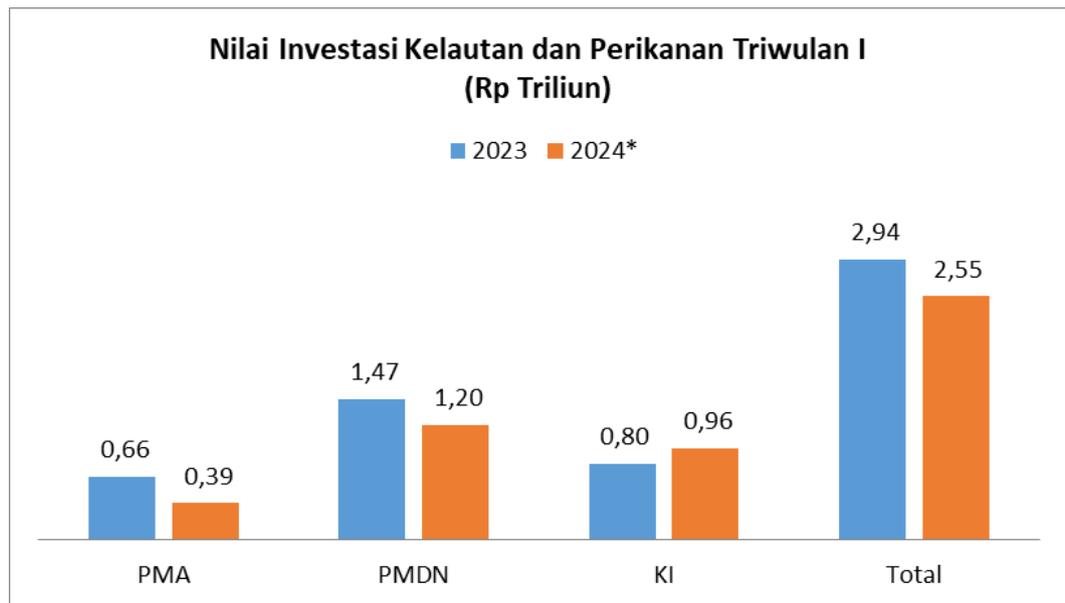
Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.

Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	2,3	8,8	1,59	9	2,55	11,1	2,94	2,55	110,87	126,14	184,91	28,33	-13,27%

*angka prognosa

Realisasi investasi KP pada periode Triwulan I tahun 2024 mencapai Rp2,55 triliun, yakni tercapai 110,87% jika dibandingkan dengan target triwulan 1 tahun 2024 yang sebesar Rp2,3 triliun, atau mencapai 28,33% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni Rp9,00 triliun. Sedangkan persentase terhadap target triwulan I tahun 2023 yakni Rp1,59 triliun mencapai 133,96%. Apabila dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2023 yakni sebesar Rp2,13 triliun, maka realisasi investasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 13,27%.



*angka prognosa

Gambar 21 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan 1 Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)

Gambar 21 menunjukkan bahwa realisasi investasi yang bersumber dari PMA dan PMDN pada triwulan 1 tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp1,59 triliun atau turun 25,56% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp2,14 triliun. Realisasi Kredit Investasi pada triwulan 1 tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp0,96 triliun atau meningkat 19,89% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp 0,80 triliun.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp4.400.000.000,- sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp637.094.000,00 atau setara dengan 14,48%.

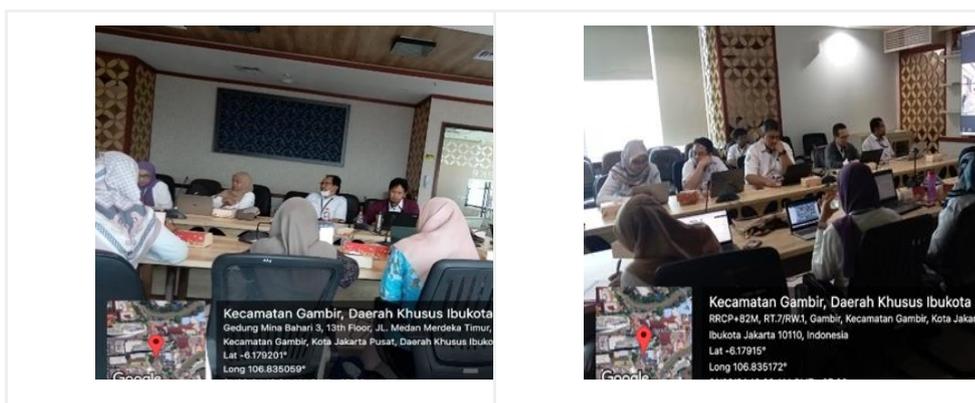
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi diantaranya:

- a. Penyusunan Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to offer* melalui Pemetaan peluang investasi melalui beberapa kegiatan antara lain:
 - 1) Identifikasi dan koordinasi lokus pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua pada tanggal 24 s.d 26 Januari 2024;



Gambar 22 Kegiatan Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua

- 2) Koordinasi dan Persiapan Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Melalui Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi di Lokasi Prioritas pada tanggal 23 Februari 2024 di Jakarta;



Gambar 23 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Lokasi Prioritas

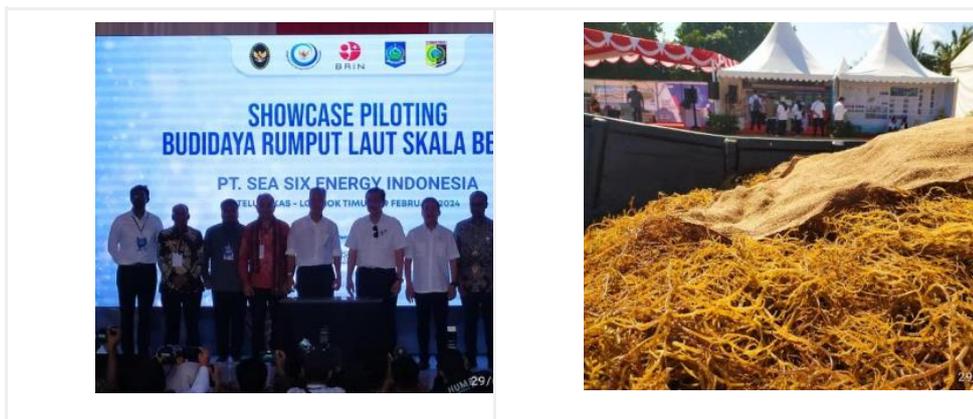
- 3) Pemetaan peluang investasi dan pendampingan bersama *Word Bank* sebagai *pilot project* pengembangan modeling rumput laut terintegrasi

hulu-hilir di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 Maret 2024;



Gambar 24 Kegiatan Pemetaan Peluang investasi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara

- 4) Pemetaan peluang investasi usaha kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat komoditas rumput laut dan lobster skala besar pada tanggal 29 Februari 2024;



Gambar 25 Kegiatan Pemetaan Peluang investasi di Nusa Tenggara Barat

- 5) Identifikasi dan koordinasi lokus pemetaan potensi dan peluang investasi usaha rumput laut di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2024.



Gambar 26 Kegiatan Identifikasi dan Koordinasi Potensi Investasi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan

b. Promosi usaha dan investasi dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

1) *Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024*

Kegiatan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2024 dihadiri oleh Menteri KKP dan 400 tamu undangan termasuk 10 Duta Besar dan perwakilan 15 Kedutaan Besar dengan rencana investasi mencapai Rp 90 Miliar.



Gambar 27 Kegiatan *Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024*

2) Pendampingan Investasi pelaku usaha Kelautan dan Perikanan melalui beberapa kegiatan antara lain:

- (a) Pelayanan dan perizinan usaha pengolahan hasil perikanan
- (b) Pendampingan rencana investasi komoditas rumput laut PT. Indo Rama yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2024



- (c) Pendampingan rencana investasi PT. Krueng Triton Indonesia untuk mengembangkan usaha pengolahan ikan yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024.



5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diamanatkan pada Pasal 13 ayat 3 bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja SLIN menggunakan kaidah pengukuran secara ilmiah berdasarkan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI). Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diperlukan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan di suatu koridor yang ditentukan. Angka capaian IKLI berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja sistem logistik ikan yang telah berjalan berdasarkan dimensi pembentuknya. Penghitungan IKLI menggunakan data primer

yang bersumber dari hasil wawancara dengan instrumen kuesioner kepada instansi terkait, pelaku jasa logistik dan pelaku usaha perikanan.

Penghitungan IKLI dilakukan dengan mengukur performa atribut berdasarkan persepsi penilaian responden dari lima dimensi pembentuk yaitu :

- a. Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan : memberikan gambaran tentang ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan produksi dan pengadaan ikan sebagai panduan untuk proses distribusi.
 - b. Dimensi Efisiensi : memberikan gambaran tingkat penggunaan sumberdaya (*resource*) dibandingkan dengan output/manfaat yang diperoleh.
 - c. Dimensi Konektivitas : memberikan gambaran terkait konektivitas sehingga pelaku logistik mendapatkan kemudahan untuk mendistribusikan barang dan proses logistik menjadi berkembang.
 - d. Dimensi Manfaat : memberikan gambaran bahwa sistem logistik memberikan nilai tambah bagi proses perencanaan dan distribusi ikan, sehingga ekonomi lokal berkembang baik, dan
 - e. Dimensi Tata Kelola : memberikan gambaran terhadap pengaruh kunci penggerak utama Sistem Logistik Ikan Nasional (SISLOGNAS) terhadap komponen Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
- b) Saat ini, penghitungan IKLI berdasarkan pada moda transportasi laut. Koridor logistik ditentukan dengan mempertimbangkan komoditas penentu, wilayah atau kawasan serta konektivitas antar wilayah. Penilaian IKLI tahun 2024 dilakukan pada 7 koridor logistik, yaitu:
1. Bitung – Surabaya/Jakarta
 2. Kupang – Surabaya/Jakarta
 3. Kendari – Surabaya/Jakarta
 4. Mimika – Surabaya/Jakarta
 5. Ambon – Surabaya/Jakarta
 6. Makassar – Surabaya/Jakarta
 7. Biak – Surabaya

Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	70,43	70,43	-	71,9	73,31**	73,31	-	73,31	104,09	104,09	-	101,96	-

** Prognosa

Kinerja logistik hasil perikanan tahun 2024 ditargetkan sebesar 70,43. Pada Triwulan I tahun 2024, telah dilakukan penghitungan IKLI dengan prognosa indeks capaian sebesar 73,31 dengan kategori Baik atau 104,09% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibanding dengan target jangka menengah tahun 2024 (71,90), maka capaian ini telah mencapai 101,96%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 73,31 dari target yang telah ditetapkan sebesar 70,43 (104,01%) maka capaian triwulan I 2024 pada kondisi tetap.

Berdasarkan hasil agregasi IKLI yang diperoleh sebesar 73,31 menunjukkan bahwa yang memiliki indeks kinerja tertinggi yaitu koridor Bitung-Surabaya/Jakarta sebesar 75,09, sedangkan koridor dengan indeks kinerja terendah yaitu pada koridor Kupang-Surabaya/Jakarta sebesar 70,57.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Kinerja Logistik Hasil Perikanan sebesar Rp55.462.372.000,- sampai dengan periode Triwulan I tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp1.477.493.000,00 atau setara dengan 2,66%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Logistik Hasil Perikanan (IKLI) selama triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan implementasi STELINA melalui sosialisasi STELINA kepada pelaku usaha di Surabaya, rapat koordinasi dengan Asosiasi Perikanan *Pole and Line* serta *Handline* Indonesia (AP2HI), pelatihan rantai pengawasan (CoC), koordinasi persiapan sosialisasi perizinan usaha penerbitan surat izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan, sosialisasi layanan jasa pasca panen KBLI 03133

dan 03143 di Jakarta dan Karawang, monitoring dan evaluasi implementasi *Warehouse Management System* (WMS), serta evaluasi aplikasi *Warehouse Management System* (WMS) pada *Cold Storage/ Cold Storage Portable* Bantuan Pemerintah (CSBP). Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan pemahaman, dan mengawasi implementasi STELINA serta aspek terkait dalam rangka mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia.



Gambar 30 Sosialisasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional dan Pelatihan Rantai Pengawasan atau of *Custody*

b. Penyusunan Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP melalui beberapa kegiatan antara lain :

- (1) Pemetaan dan pengelolaan data *cold storage* (CS) yang dilakukan untuk mereviu data CS dan meningkatkan efisiensi pengelolaan *cold storage*;



Gambar 31 Rapat Koordinasi Data *Cold Storage* Lingkup Direktorat Logistik

- (2) Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) yang bertujuan mengukur performa logistik hasil perikanan dari Biak ke Surabaya, dengan diskusi tentang kondisi *cold storage* dan parameter pengukuran IKLI;
- (3) Penetapan Harga Acuan Ikan (HAI). Agenda rapat penetapan HAI membahas perubahan HAI berdasarkan usulan pelabuhan dan formulasi HAI

yang lebih efektif. Survey dilakukan untuk verifikasi data CS dan survei lapangan terhadap harga ikan dan produksi. Hasil survei menunjukkan data anomali pada CS di DI Yogyakarta dan usulan perubahan HAI dari TPI Juwana terkait harga beberapa jenis ikan.

c. Pembinaan Lembaga Pengelola Logistik Ikan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain

- (1) Penataan rantai pasok untuk mengembangkan koridor logistik dan menyiapkan regulasi yang mendukung program prioritas KKP. Kegiatan tersebut menyoroti potensi Kabupaten Biak sebagai koridor logistik ikan dengan komoditas unggulan dan tantangan yang perlu diatasi, serta menyarankan adanya forum kerja sama untuk memperkuat implementasi SLIN di koridor tersebut.



Gambar 32 Rapat Pengembangan Koridor Logistik untuk Mendukung Program Prioritas KKP

- (2) Pembahasan naskah akademik regulasi penguatan ekosistem logistik ikan nasional yang menghasilkan rekomendasi untuk menyusun regulasi berbasis kewenangan Direktorat Logistik, mengganti terminologi IKLI menjadi AKLI, menyiapkan regulasi terkait penugasan operator dan PSO, serta melakukan sinergi antara kapal tol laut dan kapal angkut umum untuk efisiensi operasional. Pada pembahasan penataan regulasi ekosistem ikan nasional, menemukan tumpang tindih program/kegiatan dan regulasi/kewenangan antar K/L, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi Logistik ikan nasional. Direktorat Logistik berencana untuk

mengajukan Perpres Logistik Ikan Nasional dan Perpres penugasan operator dan PSO untuk distribusi ikan dalam negeri, serta mengusulkan perlunya regulasi yang lebih tinggi untuk mengatasi tumpang tindih tersebut.



Gambar 33 Rapat Pembahasan Penyiapan Naskah Akademik Regulasi Penguatan Ekosistem Logistik Ikan Nasional

d. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendukung rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas antara lain:

- (1) Pembahasan integrasi akun sistem *inhouse* Neraca Komodita (NK) perikanan dan pembahasan pengembangan sistem *inhouse* NK perikanan dengan instansi terkait.



Gambar 34 Rapat Pembahasan Integrasi Akun Sistem Inhouse NK Perikanan dan Pembahasan Pengembangan Sistem Inhouse NK Perikanan

- (2) Rapat membahas penyusunan analisis kebutuhan dan ketersediaan bahan baku pemindangan serta koordinasi kebutuhan dan ketersediaan bahan baku pemindangan di Sumatera Utara.



Gambar 35 Rapat Pembahasan Rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Baku Pemindangan

- (3) Verifikasi pengajuan perubahan Rencana Kebutuhan (RK) Komoditas Perikanan tahun 2024 untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian usulan perubahan RK sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan.
- e. Melaksanakan Inisiasi kerja sama antar pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, pembinaan dan penguatan pelaku usaha distribusi perikanan (Supplier/pengepul, pengolah/industri pengolahan) dengan penyedia logistik dalam rangka distribusi hasil perikanan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi kerjasama pengadaan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan antara operator utama, operator pendukung dan pelaku usaha di bidang perikanan baik dalam bentuk kelompok usaha, koperasi maupun badan usaha dalam menjamin serapan ikan di hulu serta menjamin ketersediaan ikan bagi konsumsi dan industri pengolahan ikan termasuk penerapan sistem manajemen gudang beku (ikan keluar, ikan masuk, dan jenis ikan). Sampai dengan periode triwulan I telah tercapai 7 kesepakatan yaitu 1 kesepakatan dalam rangka pengadaan, 2 kesepakatan dalam rangka distribusi dan 4 kesepakatan dalam rangka penyimpanan hasil perikanan.

- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana penyimpanan. Sarana dan prasarana penyimpanan adalah berupa gudang beku *portable* dilengkapi atau tidak dilengkapi ABF. Pembangunan gudang beku *portable* tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern di 10 Lokasi yaitu (1) Desa Setono, Kota Pekalongan (2) Desa Lateng, Kabupaten Banyuwangi (3) Desa Bulumeduro, Kabupaten Tuban (4) Desa Pasarbanggi, Kabupaten Rembang (5) Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi (6) Desa Cikiruhwetan, Kabupaten Pandeglang (7) Desa Warloka Pesisir, Kabupaten Manggarai Barat (8) Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe (9) Desa Kuala Raja, Kabupaten Bireun (10) Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur. Sampai dengan periode triwulan I Ditjen PDSPKP telah melakukan kegiatan Penyusunan Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima, identifikasi calon Lokasi Bantuan Pemerintah *Gudang Beku Portable* dan Identifikasi Lokasi Rencana Pembangunan Gudang Beku, sosialisasi bantuan pemerintah TA. 2024.



Gambar 36 Identifikasi calon Lokasi Bantuan Pemerintah Gudang Beku *Portable*

- g. Pengadaan Sarana Distribusi Logistik produk KP yang disediakan dan Sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi). Sarana Distribusi Logistik produk KP adalah kendaraan yang berbentuk kendaraan berpendingin roda empat dan roda enam yang dilengkapi dengan boks berefrigerasi yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama pengangkutan dan pendistribusian. Target pengadaan sarana distribusi logistik KP adalah sebanyak 10 unit. Sampai dengan periode triwulan I Ditjen PDSPKP telah melakukan kegiatan pembahasan usulan revisi juknis bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024, penyusunan

pedoman verifikasi dan validasi calon penerima Kendaraan Berefrigerasi TA.2024, serta sosialisasi monitoring sistem pada kendaraan berefrigerasi.



Gambar 37 Pembahasan usulan revisi juknis bantuan pemerintah Kendaraan Berefrigerasi TA.2024 dan Penyusunan Pedoman Verifikasi Dan Validasi Calon Penerima Kendaraan Refrigerasi

h. Fasilitasi penerapan sistem resi Gudang kepada Lembaga Pengelola Gudang pada Perumda Karya Lasinrang di Kabupaten Pinrang dan CV. Anugerah Agung Global di Palopo.



Gambar 38 Identifikasi Calon Pengelola Sistem Resi Gudang

i. Fasilitasi Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan mencakupi beberapa kegiatan terkait perencanaan teknis pembangunan Kapal Angkut Ikan. Pertama, KKP bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dalam rangka perencanaan teknis untuk membahas output pekerjaan, persyaratan kualifikasi penyedia, standar teknis,

kebutuhan tenaga ahli, dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan. ITS menyatakan kesiapannya untuk mendukung KKP dalam membangun Kapal Angkut Ikan dan meminta dukungan data untuk mempercepat penyiapan dokumen analisis teknis. Kedua, KKP melaksanakan rapat persiapan perencanaan teknis dengan fokus pada output pekerjaan, persyaratan kualifikasi penyedia, standar teknis, dan kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung.



Gambar 39 Pertemuan dan Persiapan Perencanaan Teknis Kapal Angkut Ikan

- j. Pengadaan Prasarana Pendukung Operasional gudang Beku 1000 Ton yang dibangun dan disediakan dalam rangka mendukung operasional dan efektivitas ruang penyimpanan ikan dengan menerapkan sistem jaminan mutu.

6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program menunjukkan jumlah realisasi pembiayaan kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (non bank) kepada UMKM kelautan dan perikanan (KP). Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP dengan melakukan pemantauan penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari lembaga keuangan non bank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh *Holding* Ultra Mikro, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) baik di pusat maupun

daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada tahun 2024 sebesar Rp 10,26 Triliun. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan sinergi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi akses kredit sektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA).

Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)
Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	1,7	6,33	1,92	8,8	1,6	7,37	0,97	1,6	94,12	116,43	50,52	18,18	64,95%

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Desember 2024, diolah Ditjen PDSPKP

Pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program pada Triwulan I 2024 mencapai Rp1,60 Triliun yang disalurkan kepada 62.869 pelaku usaha KP, atau tercapai 94,11% dibandingkan target Triwulan I 2024 sebesar Rp1,70 Triliun. Realisasi pembiayaan ini terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,40 triliun yang disalurkan kepada 26.393 pelaku usaha, dan Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp196 miliar yang disalurkan kepada 36.476 pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp974 Miliar, maka realisasi pembiayaan tumbuh sebesar 64,55%. Apabila dibandingkan dengan target nilai

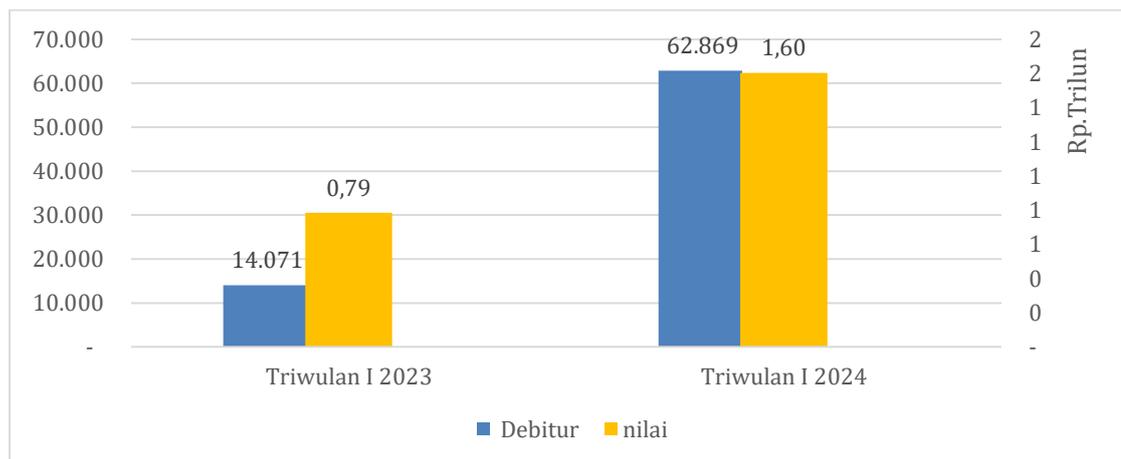
pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp10,26 Triliun, maka realisasi nilai pembiayaan Triwulan I 2024 mencapai 15,59% dari target tahun 2024.

Tabel 12 Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024

Sumber Pembiayaan	Nilai (Rp)	Debitur (Pelaku Usaha)	Persentase terhadap Total Nilai (%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1.406.068.850.000	26.393	87,72
Ultra Mikro (UMi)	196.814.000.000	36.476	12,28
Total	1.602.882.850.000	62.869	100

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Maret 2024, diolah Ditjen PDSPKP

Realisasi KUR secara nasional sampai dengan Triwulan I 2024 mencapai Rp55,6 triliun atau meningkat sebesar 69% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp32,9 Triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi KUR nasional, maka proporsi realisasi KUR sektor KP senilai 1,6 T maka proporsi sektor KP terhadap KUR nasional sebesar 2,8%.



Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Maret 2024, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 40. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024

Peningkatan ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP melalui kredit program diantaranya:

- a. Kebijakan KUR untuk Memperluas Penyaluran dan Mendorong Peningkatan Debitur KUR, diantaranya penegasan pelaksanaan KUR tanpa agunan tambahan untuk plafon KUR s.d. Rp100 juta dan penambahan target debitur baru dan target debitur graduasi penyaluran KUR dengan plafon KUR tahun 2024

- b. Telah disusunnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan

Secara umum beberapa permasalahan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian nilai pembiayaan usaha KP antara lain:

- a. Akses pembiayaan yang sulit karena pelaku usaha belum *bankable* dalam kelayakan usaha;
- b. Masih minimnya informasi tentang calon debitur potensial.

Beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan pada periode mendatang antara lain:

- a. Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan;
- b. Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah;
- c. Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data kusuka dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank.

Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program sebesar Rp18.031.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp2.467.996.000 atau setara dengan 13,69%.

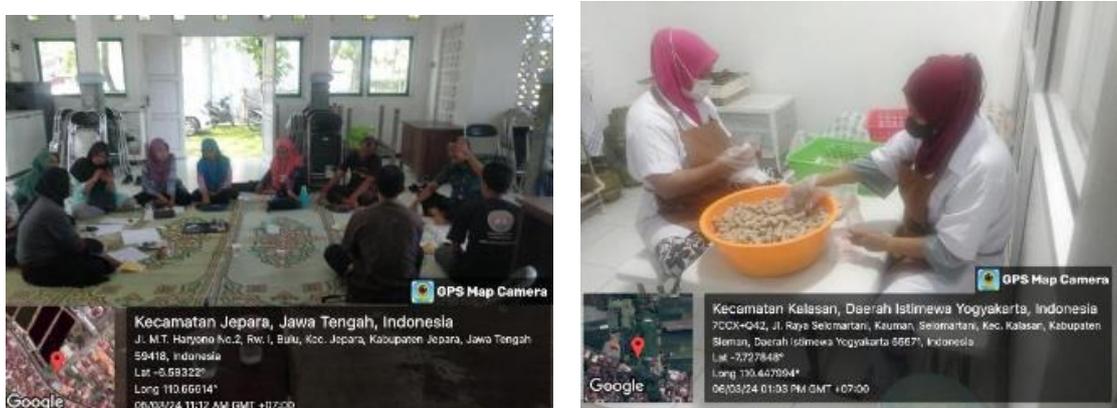
Ditjen PDSPKP terus melakukan upaya dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan I sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi triwulan IV tahun 2023 diantaranya:

- a. Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya. Sampai dengan periode triwulan I tahun 2024 telah tercapai sebanyak 45 lembaga.



Gambar 41 Pendampingan Penguatan Kelembagaan usaha hasil KP di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

- b. Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan. Sampai dengan periode triwulan I tahun 2024 telah tercapai sebanyak 150 UMKM/wirausaha.



Gambar 42 Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha Baru, serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

- c. Fasilitasi pemberdayaan usaha UMKM KP melalui intermediasi dalam kegiatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri atas fasilitasi akses pembiayaan kredit program dan/atau fasilitasi pada pendampingan Gerai Investasi dan layanan usaha (GISELA) dan kegiatan pemberdayaan lainnya (fasilitasi kemitraan, perizinan dan kelembagaan). Sampai dengan periode triwulan I tahun 2024 telah tercapai sebanyak 150 UMKM/wirausaha.



Gambar 43 Fasilitasi Akses Permodalan di Semarang dan Boyolali

d. Fasilitasi kemitraan usaha UMKM KP melalui kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan. Sampai dengan periode triwulan I tahun 2024 telah tercapai sebanyak 26 UMKM/wirausaha.



Gambar 44 Fasilitasi Kemitraan Usaha dan Investasi Hulu Hilir di Kabupaten Gresik dan Purwakarta

7. Nilai PNPB Ditjen PDSKPK

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 13 Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	1,90	8,65	-	10,26	2,49	15,22	-	2,49	131,05	175,95	-	24,27	-

Pada periode triwulan I tahun 2024, realisasi nilai PNBP Ditjen PDSPKP mencapai Rp2,49 miliar atau setara dengan 131,05% terhadap target triwulan I tahun 2024 sebesar Rp1,90 miliar. Jika dibandingkan dengan nilai PNBP tahun 2024 sebesar Rp10,26 miliar, maka capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2024 telah mencapai 24,27%. Capaian PNBP Tahun 2024 yang mencapai 131,05% (Rp2.487.733.704,00) berasal dari penerimaan non anggaran sebesar Rp83.282.582,00 dan penerimaan dari sumber SDA dan Non SDA sebesar Rp2.404.451.122,00.

Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian nilai PNBP Ditjen PDSPKP yaitu melakukan penyampaian laporan yang sudah disahkan kepada Biro Keuangan dan KKP dan Inspektorat Jenderal KKP.

8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik baik di bidang logistik hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, usaha dan investasi dan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tabel 14 Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	1.735	49.600	-	66.000	1.906	52.428	-	1.906	109,86	105,70	-	2,89	-

Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP pada periode triwulan I tahun 2024 mencapai 19.096 orang atau setara dengan 109,86% terhadap target periode triwulan I tahun 2024 sebesar 1.735 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 66.000 orang, maka capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2024 telah mencapai 2,89%.

Data capaian tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan periode triwulan I tahun 2024 diperoleh dari jumlah seluruh orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dari kegiatan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yaitu:

1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan adalah 745 orang dari target 745 orang atau setara 100%;
2. Tenaga kerja yang terlibat di bidang usaha dan investasi kelautan dan perikanan adalah 1.106 orang dari target 940 orang atau setara 117,65%. Tenaga kerja ini diperoleh dari 40 orang pada lembaga usaha kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya, 150 orang dari UMKM KP yang difasilitasi pemberdayaan usaha, 891 orang Penumbuhan wirausaha KP dan 25 orang dari UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha;

3. Tenaga kerja yang terlibat di bidang logistik kelautan dan perikanan adalah 55 orang dari target 50 orang atau setara dengan 110%. Tenaga kerja ini diperoleh dari anggota koperasi/kelompok penerima bantuan pemerintah;

Sasaran 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat

9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Secara konseptual nilai tukar pengolah hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP dihitung berdasar *sampling* yang akan dilakukan di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi. Lokasi yang menjadi *sampling* dipilih berdasarkan kesepakatan antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah UPI terutama skala mikro dan kecil dan variasi jenis kegiatan pengolahan ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 45 Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Tabel 15 Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)		104,25		104,75		104,67				100,40			

Indikator Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2024 sebesar 104,75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2024. Capaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2023 sebesar 104,67. Capaian dimaksud setara dengan 100,40% terhadap target tahun 2023 sebesar 104,25 kg/kap.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sampai dengan Maret sebesar Rp42.919.100,00. Realisasi ini setara dengan 1,04% terhadap pagu anggaran sebesar Rp444.726.000,00.

Pada Triwulan I tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi NTPHP dengan tujuan menyusun rancangan Keputusan Dirjen PDSPKP tentang Tim NTPHP Pusat dan NTPHP Daerah dan membahas penyusunan listing, kuesioner dan pedoman NTPHP. Melibatkan Pejabat Fungsional Pembina Mutu Ahli Utama, Katimja Data dan Layanan Publik, Timja Hukum, BRIN, BBRSEKP dan Lingkup Dit. PBM.
- b. Pengadaan Pabrik Es *Portable* nelayan di lokasi kampung nelayan modern. Pabrik es *portable* adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es *portable* yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya. Pada tahun 2024, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 11 Unit, sampai dengan periode triwulan I masih dalam proses identifikasi dan *feasibility* lokasi.
- c. Pengadaan *chest freezer* sebanyak 437 unit. Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil sehingga meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga dan memberikan nilai tambah bagi UMK. Sampai dengan periode triwulan I masih dalam proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan pemerintah.
- d. Pengadaan peralatan pengolahan sebanyak 315 unit. Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumatan daging (bakso dan *value added*)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan (termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Sampai dengan periode triwulan I masih dalam proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan pemerintah.

- e. Pengadaan Sarana Pasca Panen yang disediakan yang disediakan sebanyak 9 unit dan 8 unit mendukung korporasi. Bantuan pemerintah ini merupakan Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut. sampai dengan periode triwulan I masih dalam proses identifikasi dan *feasibility* lokasi.



Gambar 46 Koordinasi dengan Ditjen Perikanan Budidaya terkait Calon Lokasi Sarana Pascapanen di Kampung Perikanan Budidaya

Sasaran 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP

10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat hasil penilaian indikator pengungkit dan indikator hasil lebih besar atau sama dengan 75 serta memenuhi syarat lain sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi minimal 60% pada area pembangunan

manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 16 Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)		4		2		5				125,00			

Pada tahun 2024, Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebanyak 4 unit kerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dan penghitungannya dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2023 capaian indikator Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP sebanyak 5 unit kerja atau setara 125% dari 4 unit kerja yang ditargetkan.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp495.746580.000,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 15,13% terhadap pagu anggaran sebesar Rp.3.276.651.000,00.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 2 Februari 2024



Gambar 47 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 lingkup Ditjen PDSPKP

- b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP Semester II Tahun 2023 pada tanggal 16 Februari 2024;



Gambar 48 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP Semester II Tahun 2023

- c. Keikutsertaan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2024 pada tanggal Tanggal 22 Februari 2024 dan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemasaran pada tanggal 1 Maret 2024.



Gambar 49 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP

11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 17 Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	3,1	-	3,3	-	3,83	-	-	-	123,55	-	-	-

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 3,3. Penghitungan capaian Indikator kinerja Nilai ini dilakukan secara tahunan, sehingga capaiannya dapat terlihat pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2023, Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses

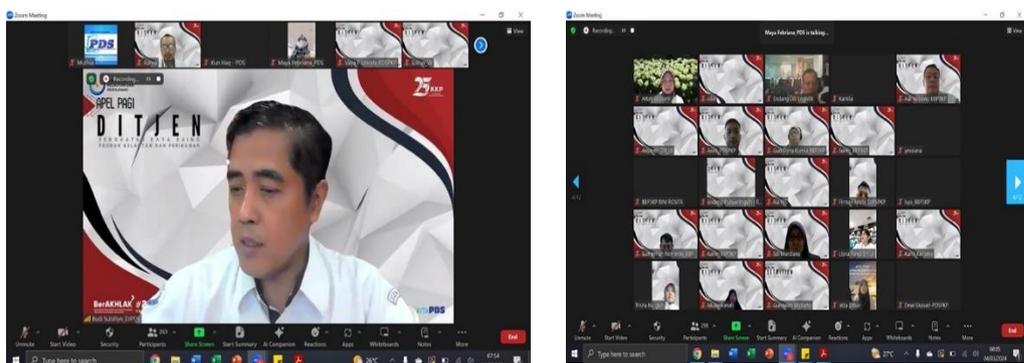
Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP sebesar 3,83. Capaian dimaksud setara dengan 123,55% terhadap target tahun 2023 sebesar 3,1.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp472.067.180,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 85,80% terhadap pagu anggaran sebesar Rp550.212.000,00.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP antara lain:

Setditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Pembahasan rencana kerja Satgas SPIP Lingkup Ditjen PDSPKP di Bogor pada tanggal 25 Maret 2024. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP. Kegiatan bertujuan untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP dan jadwal penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP;
2. Sosialisasi manajemen risiko pada tanggal 4 Maret 2024 melalui media zoom meeting yang diikuti oleh pegawai Ditjen PDSPKP. Pada tahun 2024 terdapat 34 kegiatan yang dilakukan Pengendalian Intern (SPI) berupa 16 kegiatan dengan risiko tinggi (*unacceptable*) dan 18 kegiatan risiko sedang (*issue*).



Gambar 50 Sosialisasi Manajemen Risiko Lingkup Ditjen PDSPKP

12. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi

- a. Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di *update* pada aplikasi SIMPEG *Online* KKP,
- b. Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP berdasarkan Penghitungan nilai diklat struktural dan fungsional,
- c. Kinerja dengan bobot 30% diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja *Online* KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori, dan
- d. Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan di *update* pada aplikasi SIMPEG.

Tabel 18 Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)		83,2		87		90,51				108,79			

Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 87. Penghitungan capaian Indikator ini secara semesteran, sehingga capaiannya dapat dilihat pada triwulan II tahun 2024. Pada tahun 2023, Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkungan sebesar 91,23. Capaian dimaksud setara dengan 109,65% terhadap target tahun 2023 sebesar 83,2. Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMAO Nilai Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP yaitu sebesar 90,51. Nilai indeks ini menunjukkan gambaran kualitas profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP pada tahun 2023 kategori Cenderung Profesional/tinggi.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp434.983.090,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 19,77% terhadap pagu anggaran sebesar Rp2.200.000.000,00.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Perencana pada tanggal 8 Januari 2024 di Jakarta;



Gambar 51 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Perencana

- b. Rapat Penyusunan AD/ART dan Kode Etik Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP pada tanggal 16 Januari 2024.



Gambar 52 Rapat Penyusunan AD/ART dan Kode Etik Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Binaan Ditjen PDSPKP

- c. Kegiatan Penyusunan Uraian Fungsi Jabatan Tinggi Pratama Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Unit Pelaksana Teknis dan pada tanggal 19 – 20 Maret 2024 Di Bogor Jawa Barat.



Gambar 53 Rapat Penyusunan Uraian Jabatan Tinggi Pratama lingkup Ditjen PDSPKP

13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap penerapan SAKIP pada unit kerja eselon I KKP yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, serta berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 19 Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)		80,5		84		83,01				103,12		0,00	

Penilaian Mandiri SAKIP Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 84. Penghitungan capaian Indikator ini secara tahunan, sehingga capaiannya dapat dilihat pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2023, Capaian Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 83,01. Capaian dimaksud setara dengan 103,12% terhadap target tahun 2023 sebesar 80.50. Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal KKP terhadap AKIP Ditjen PDSPKP memperoleh nilai 83,01 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (Memuaskan).

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sekretariat Ditjen PDSPKP, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.370.134.878,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 15,80% terhadap pagu anggaran sebesar Rp8.672.836.000,00.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran ssampai dengan Periode Triwulan IV Tahun 2023 pada tanggal 3-5 Januari 2024. Kegiatan dibuka oleh Sesditjen PDSPKP dan pembahasan dilaksanakan oleh Koordinator Program yang dihadiri oleh seluruh perwakilan eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, Biro perencanaan dan Kementerian PPN/Bappenas. Agenda pada rapat dimaksud adalah Pengisian Capaian, Verifikasi dan Validasi capaian Indikator Kinerja pada Aplikasi Emonev Bappenas PP 39, evaluasi Rencana Aksi Indikator Kinerja Level 2 dan 1 Evaluasi renaksi periode triwulan IV tahun 2023.



Gambar 54 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan dan anggaran s.d Periode Triwulan IV Tahun 2023

- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 pada tanggal 17-18 Januari di Depok yang dihadiri oleh tim kinerja Ditjen PDSPKP, Inspektorat Jenderal KKP dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu.



Gambar 55 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

- c. Rekonsiliasi Dokumen Kinerja pada tanggal 19-20 Februari 2024 pada di Bogor yang dihadiri oleh tim kinerja Ditjen PDSPKP, Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Perencanaan Setjen KKP.



Gambar 56 Rekonsiliasi Dokumen Kinerja Ditjen PDSPKP

- d. *Focus group Discussion* Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Periode 2025-2029 (Renstra Teknokratik Ditjen PDSPKP Tahun 2025-20229) pada tanggal 5 s.d 6 Februari 2024 di Jakarta.



Gambar 57 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

- e. Dialog Kinerja Organisasi Ditjen PDSPKP Tahun 2024 pada tanggal 3 Februari 2024 yang melibatkan seluruh eselon II dan tim kinerja lingkup Ditjen PDSPKP. Kegiatan dimaksud dalam rangka adalah melakukan pemantapan Indikator Kinerja Level I dan level II Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dan Pembahasan Rancangan Indikator Kinerja Level I dan II Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.



Gambar 58 Dialog Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

- f. Rapat Kerja Teknis Ditjen PDSPKP pada tanggal 6-8 Maret 2024 di Yogyakarta. Kegiatan dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 6 Maret 2024. Kegiatan dihadiri oleh Tenaga ahli dan pakar perikanan, Kepala Dinas KP Provinsi, kepala dinas kelautan dan perikanan kab/kota, asosiasi perikanan, UMKM, Direktur lingkup PDS dan ketua tim kerja lingkup Ditjen PDSPKP.



Gambar 59 Rapat Kerja Teknis Ditjen PDSPKP

- g. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan. Kegiatan-kegiatan dimaksud telah dilakukan dengan melibatkan

pejabat eselon II (Sesditjen PDSPKP) sebagai data dukung keterlibatan pimpinan dalam penilaian aspek pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;



Gambar 60 Verifikasi data Capaian kinerja Ditjen PDSPKP

- h. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Direktur Jenderal PDSPKP serta *stakeholders* terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 3 minggu setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP.
- i. Penyampaian laporan kinerja pada ESR menpan paling lambat Februari 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja unit organisasi.

14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2022.

Tabel 20 Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)		≤0,5		≤0,5		0,26				120,00			

Pada tahun 2024, batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP TA. 2021 ditargetkan sebesar ≤0,5%.

Penghitungan capaian Indikator ini secara tahunan, sehingga capaiannya dapat dilihat pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2023 terhitung sebesar 0,26%, capaian tersebut setara dengan 120% (persentase maksimal dalam aplikasi Kinerja) terhadap target tahun 2024 maupun terhadap target jangka menengah tahun 2024 yakni ≤1%.Sifat polarisasi indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP TA 2024 adalah minimize atau semakin kecil maka kinerjanya semakin baik.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp257.926.000,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 40,65% terhadap pagu anggaran sebesar Rp634.526.000,00.

Ditjen PDSPKP pada periode triwulan I telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja dan sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi triwulan IV tahun 2024 antara lain :

- a. Telah melakukan penyusunan dokumen manajemen risiko pada kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP tahun 2024 dan melakukan pemantauan atas pemantauan dokumen manajemen risiko tahun 2023;
- b. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan periode Semester II Tahun Anggaran 2023 (Unaudited) Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 15 s.d 20 Januari 2024. Pada kegiatan ini Satuan Kerja lingkup Ditjen PDSPKP dan Eselon I telah menyusun laporan keuangan dan memetakan secara detail seluruh permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Rapat Pemanfaatan BMN Ditjen PDSPKP yang dikerjasamakan dengan PT Perindo pada tanggal 12 Februari. Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal PDSPKP dan dihadiri oleh Itjen KKP, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Kepala Biro Keuangan KKP, dan seluruh perwakilan Direktorat dari Ditjen PDSPKP.
- d. Penandatanganan perjanjian sewa Barang Milik Negara Berupa Cold Storage 2000 Ton dan Sarana Pendukungnya di Muara Baru Dalam Masa Transisi dan Perjanjian Sewa Sewa Gedung Bangunan Pasar Ikan Modern Muara Baru. DKI Jakarta Dalam Masa Transisi pada tanggal 16 Februari 2024
- e. Kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban permintaan BPK-RI pada tanggal 22 Januari 2024 di ruang rapat Investasi GMB III lantai 15;
- f. Keikutsertaan dalam kegiatan monitoring kualitas data keuangan serta Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal tanggal 12-13 Februari 2024. Biro Keuangan KKP melakukan reuiu bersama Inspektorat IV KKP dan menerbitkan BAR Rekon LK TA 2023 (Unaudited) dan Kertas Kerja Reuiu (KKR) LK TA 2023 (Unaudited);
- g. Keikutsertaan dalam kegiatan rekonsiliasi pengelolaan piutang yang telah diserahkan ke PUPN di lingkungan KKP pada tanggal 25 Maret 2024 di GMB II lantai 14;
- h. Keikutsertaan dalam kegiatan rekonsiliasi data dan pembahasan TLRHP BPK-RI triwulan I 2024 tanggal 26 Maret 2024 di ruang rapat lantai II.

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 21 Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80	75	75	80	100	93,18	88,46	100	125,00	124,24	117,95	125,00	13,05%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 100%. Capaian ini setara dengan 125% terhadap target Triwulan I dan Target tahun 2024 yaitu 80%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 93,18%, maka capaian Triwulan I tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,05%. Jika dibandingkan target jangka menengah tahun 2024 sebesar 80%, maka capaian ini setara dengan 125%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp389.752.990,00 sampai dengan Bulan Maret

2024. Realisasi ini setara dengan 76,32% terhadap pagu anggaran sebesar Rp510.692.000,00.

Pada Triwulan I 2024, Setditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan

- a. Pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada tanggal 12 Februari 2024. Rapat dihadiri oleh perwakilan tim kerja unit eselon II dengan agenda pembahasan laporan hasil pemeriksaan beserta dokumen tindak lanjut yang harus disiapkan. Dokumen dimaksud agar segera disiapkan agar dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas atas tindak lanjut tersebut kemudian di upload ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>;
- b. Pembahasan tindak lanjut dengan tim Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 7 Maret 2024. Hasil Prosentase tindak lanjut setelah diskusi dan pembahasan yaitu adalah sebesar 98,52% dengan sisa berupa 14 rekomendasi berstatus “proses” dan 6 rekomendasi berstatus “pending”;
- c. Pemantauan tindak lanjut periode triwulan I tahun 2024 dilanjutkan pada tanggal 21 s.d. 24 Maret 2024. Hasil Prosentase tindak lanjut setelah diskusi dan pembahasan yaitu adalah sebesar 99,12% dengan sisa berupa 11 rekomendasi berstatus “proses” dan 1 rekomendasi berstatus “pending” ;

16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 22 Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)		75		76		79,79				106,39		0,00	

Indikator kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP yang disusun oleh Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 76. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, sehingga capaiannya dapat terlihat pada akhir tahun 2024. Capaian indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik yang disusun oleh Ditjen PDSPKP, diseleksi dan diajukan ke Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik oleh Koordinator Reformasi. Pada tahun 2023, nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 75. Capaian pada Indikator kinerja ini adalah 79,79 setara dengan 106,39%.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp30.300.213,00. Realisasi dimaksud setara dengan 6.96% dari alokasi anggaran sebesar Rp435.560.000,00.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan rapat Finalisasi Penyusunan Revisi Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 54 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 11 Januari 2024;
- b. Melaksanakan rapat Pembahasan Hasil Validasi Data SKM Triwulan IV Tahun 2023 dan Finalisasi Revisi Standar Pelayanan, tanggal 17 Januari 2024;
- c. Melaksanakan Koordinasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 2 Februari 2024, dengan tujuan untuk melakukan pembahasan:
 - 1) Pemenuhan bukti dukung Penilaian Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Tahun 2023;
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik tahun 2024;
 - 3) Penyampaian usulan nama anggota Tim Pengelola Layanan Pengaduan PTSA KKP dan Pejabat Penghubung PTSP BKPM Tahun 2024;
 - 4) Pengumpulan data produk pelayanan administratif untuk disampaikan kepada Ombudsman RI; dan
 - 5) Penjajakan jabatan fungsional Penata Perizinan;
- d. Melaksanakan rapat pembahasan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP, tanggal 13 Maret 2024 dalam rangka koordinasi pembahasan

kegiatan pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP pasca diterbitkannya Permen KP No. 5/2024;

- e. Melaksanakan rapat penyusunan Draft Revisi Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 24 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP dan *knowledge sharing* penerbitan perizinan berusaha subsektor pemasaran dan surat ijin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan, tanggal 15 Maret 2024;
- f. Melaksanakan rapat Validasi Data dan Evaluasi Hasil SKM Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 27 Maret 2024;

17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 23 Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	92	92	94	133,33	133,33	100	133,33	141,84	144,92	108,70	141,84	33,33%

Persentase Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 133,33%. Capaian ini setara dengan 141,84% terhadap target Triwulan I tahun 2024. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu pada Triwulan I tahun 2023, capaian Triwulan I 2024 mengalami peningkatan sebesar 33,33%.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.977.473.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan I sebesar Rp565.168.086,00 atau setara dengan 28,58% terhadap total alokasi anggaran.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan I Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).

18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 24 Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)		93,75		93,76		89,87				95,86			

Target Nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2024 sebesar 93,76. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2024. Pada tahun 2023 tercapai sebesar 89,87. Capaian ini setara dengan 95,86% terhadap target tahun 2023 sebesar 93,75.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp257.926.000,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 38,27% terhadap pagu anggaran sebesar Rp674.046.000,00.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan guna pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tahun 2023 antara lain:

- a. Keikutsertaan dalam rapat peningkatan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dalam hal pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi lembar III DIPA.
- b. Koordinasi dalam penginputan Capaian Output secara berkala;
- c. Pembahasan revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyesuaian RPD (halaman III DIPA) Sekretariat Ditjen PDSPKP;
- d. Keikutsertaan dalam evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2024.

19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Penyempurnaan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran kembali dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 25 Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)		86		86		90,86				105,65			

Nilai NKA lingkup Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 90,86. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan I tahun 2024. Pada tahun 2023 telah tercapai sebesar 90,86. Capaian ini setara dengan 105,65% terhadap target tahun 2024 sebesar 86.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.019432.000,00 dengan total realisasi Rp70.350.000,00 atau setara dengan 1,75%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a) Melakukan penginputan capaian output melalui aplikasi SMART Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Satker Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan;
- b) Monitoring dan evaluasi atas capaian output yang telah diinput seluruh satker Ditjen PDSPKP pada Aplikasi SMART Kemenkeu;
- c) Berpartisipasi dalam rapat Assessment Rincian output KKP bersama Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Januari 2024;



Gambar 61 Kegiatan Penginputan Capaian Output Ditjen PDSPKP

- d) Melakukan assessment rincian output lingkup Ditjen PDSPKP melalui aplikasi SMART Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 55 Tahun 2024 tentang Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 31 Januari 2024;

20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 26 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)		77,5		80		79,69				102,83			

Penilaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya. Pada tahun 2023,

Capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 79,69. Capaian dimaksud setara dengan 102,83% terhadap target tahun 2023 sebesar 77,5.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp104.093.589,00 sampai dengan Bulan Maret 2024 dari pagu Rp744.520.000,-. Realisasi ini setara dengan 13,98%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tahun 2023 antara lain :

- a. Penyusunan laporan tahunan PBJ lingkup Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 17 -18 Januari 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. *Updating* Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 29 dan 30 Januari, 13,15 dan 16 Februari 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat.
- c. *Brainstorming* Percepatan PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 12 Februari 2024 di Jakarta.
- d. Rapat Koordinasi PBJ dengan Pejabat Pengadaan Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 27 Februari 2024 di Jakarta dalam rangka pembahasan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa dengan adanya Penetapan JF Fungsional PBJ dari Biro Umum dan PBJ sebagai pejabat pengadaan Ditjen PDSPKP;
- e. Rapat Koordinasi PBJ Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 28 Februari 2024 di Jakarta dalam rangka pembahasan usulan Satu database PBJ lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP;
- f. Penyiapan dokumen rewiu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 4-5 Maret 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Bogor.
- g. Penyeragaman Pemaketan RUP pada Aplikasi SiRUP lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 15 Maret 2024 di Ruang Rapat Biro Umum dan PBJ, Gedung Mina Bahari I Lantai 3, DKI Jakarta dalam Pembahasan rencana pembuatan dashboard otomasi data RUP dan Realisasi SAKTI.

- h. Percepatan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 21 Maret 2024 di Jakarta dalam rangka melakukan update progress pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Ditjen PDSPKP.



Gambar 62 Rapat Koordinasi Percepatan PBJ Ditjen PDS dengan Pejabat Pengadaan dari Biro Umum dan PBJ

- i. Rapat Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 26-28 Maret 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Bogor yang bertujuan untuk melakukan update Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) setelah revisi POK terakhir dan pencatatan realisasi Paket PBJ non Tender dan swakelola Tahun Anggaran 2024 pada Aplikasi LPSE (AMEL);



Gambar 63 Rapat Updating RUP dan Pencatatan LPSE (AMEL) di RR Discus Raiser Ikan

21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran

yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 27 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP (%)	-	77,5	-	80	-	95,32	-	-	-	122,99	-	-	-

Indikator tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PDSPKP ditargetkan 80%. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV sehingga pada triwulan I belum dapat diketahui tingkat capaiannya. Pada tahun 2023, Capaian tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PDSPKP sebesar 95,32. Capaian dimaksud setara dengan 122,99% terhadap target tahun 2023 sebesar 77,5. Pada tahun 2023, Jenis Bantuan Pemerintah tahun 2022 yang menjadi sampling pada penilaian efektivitas Bantuan Pemerintah/Kegiatan Prioritas Ditjen PDSPKP adalah Pasar Ikan, *Chest Freezer*, Gudang Beku, Pabrik Es dan Kendaraan Berpendingin.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp70.359.886,00 sampai dengan Bulan Maret 2024 dari pagu Rp240.000.000,- atau setara dengan 29,32%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP melaksanakan pemantauan secara berkala atas pemanfaatan bantuan pemerintah yang termasuk dalam kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP. Selain itu Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Penyusunan laporan evaluasi program/kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP pada tanggal 8 Januari 2024 ;



Gambar 64 Penyusunan Laporan Evaluasi/Program Ditjen PDSPKP

- b. Keikutsertaan pada Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan berbasis rincian output, kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga, kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN) pada tanggal 12 s.d. 13 Februari 2024.

22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025;

- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan I tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan I Tahun 2024;
- f. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- g. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 28 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Ditjen PDSPKP (%)	-	77,5	-	80	-	97,5	-	-	-	125,81	-	-	-

Pada tahun 2024, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80%. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Indikator Kinerja yang sifatnya tahunan, dimana penilaian capaiannya akan dilakukan oleh APIP pada akhir tahun. Pada tahun 2023, Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP sebesar 80. Capaian dimaksud setara dengan 125,81% terhadap target tahun 2023 sebesar 77,5.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp556.000.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan I sebesar Rp202.490.982,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 36,41% terhadap total alokasi anggaran.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP melaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- a. Pemindahtanganan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP melalui kegiatan penghapusan alat laboratorium dengan mekanisme penghapusan barang melalui lelang di KPKNL Bogor pada tanggal 16 Januari 2024 dan Rapat percepatan proses Hibah PIH Pejompongan kepada Pemda DKI Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024. Tujuan pertemuan adalah menyusun langkah-langkah tindak lanjut percepatan proses hibah PIH Pejompongan dan penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP perihal setoran PNBP yang menjadi kewajiban PT Putra Kirana Sentosa.
- b. Penatausahaan BMN Sakter Sekretariat Ditjen PDSPKP dan Sakter Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan Inventarisasi BMN *Cold Storage* 1000 ton Muara Baru dan inventarisasi BMN lainnya secara berkala.
- c. Pendayagunaan BMN melalui Pemanfaatan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP melalui Rapat Pemanfaatan BMN Ditjen PDSPKP yang dikerjasamakan dengan PT Perindo pada tanggal 12 Februari. Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal PDSPKP dan dihadiri oleh Itjen KKP, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Kepala Biro Keuangan KKP, dan seluruh perwakilan Direktorat dari Ditjen PDSPKP.



Gambar 65 Rapat Pemanfaatan BMN Ditjen PDSPKP

23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen PDSPKP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Ketersediaan data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Data PDSPKP yang akurat akan menghasilkan proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP diberikan amanat untuk menjadi Unit Data Eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data lingkup Ditjen PDSPKP. Beberapa kegiatan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP antara lain pengumpulan data pelaku usaha dan produksi, verifikasi dan validasi data serta analisis data bidang PDSPKP.

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Dalam rangka menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- 1) Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1), Bobot Nilai (30%)
- 2) Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- 3) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%

Tabel 29 Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi Terhadap Target (%)			Persentase Realisasi S.d TW I Terhadap Target 2024	Persentase pertumbuhan TW I 2023 - TW I 2024
	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	Tahun 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	S.d TW I 2024	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP (%)	-	90	-	91	-	100	-	-	-	111,11%	-	-	-
--	---	----	---	----	---	-----	---	---	---	---------	---	---	---

Pada tahun 2024, Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP sebesar 100. Capaian dimaksud setara dengan 111,11% terhadap target tahun 2024 sebesar 90. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 91%. Capaian Indikator Kinerja Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PDSPKP adalah Indikator Kinerja yang sifatnya tahunan, dimana penilaian capaiannya akan dilakukan oleh APIP pada akhir tahun. Pada tahun 2023, Capaian Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PDSPKP sebesar 100. Capaian dimaksud setara dengan 111,11% terhadap target tahun 2023 sebesar 90.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.731.129.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan I sebesar Rp350.142.562,00 atau setara dengan 20,23% terhadap total alokasi anggaran.

Dalam rangka pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP selama Triwulan I 2024 antara lain:

- a. Melakukan kegiatan penguatan pendataan dan percepatan validasi data bidang PDSPKP di beberapa kabupaten/kota atau provinsi antara lain DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat.



Gambar 66 Penguatan Pendataan dan Percepatan Validasi Data Bidang PDSPKP di Provinsi Kalimantan Barat

- b. Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan satu data bidang PDSPKP, yaitu:
- 1) Rapat Pemenuhan Data Dukung Updating Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (KPDA) Tahun 2023 pada tanggal 18 Januari 2024;
 - 2) Pembahasan Satudata KP Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 pada tanggal 5 Februari 2024;
 - 3) Pembangunan Basis Data dan Analisa Data Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 12 Februari 2024;
 - 4) Persiapan Pelaksanaan Validasi Nasional Satudata Bidang PDSPKP Semester II Tahun 2023, 26 Februari 2024;
 - 5) Validasi Satudata KP Bidang PDSPKP Tahun 2023, 20 Maret 2024.



Gambar 67 Kegiatan Validasi Satudata KP Bidang PDSPKP Tahun 2023

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2024, Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp386.899.151.000,00 yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Pada pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp69.879.655.000,00. sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp317.019.496.000,00. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 Ditjen telah merealisasikan anggaran sebesar Rp50.242.691.000,00 atau setara dengan 15,85% terhadap total pagu anggaran awal atau 12,99% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif).

Tabel 30. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan I Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Pusat	332.063.886.000	44.678.510.194	13,45%
2	UPT	38.221.254.000	5.564.180.623	14,56%
3	Tugas Pembantuan	16.614.011.000	0	95,48%
Total		386.899.151.000	50.242.690.817	12,99%

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi Sampai dengan Maret 2024

Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	57.574.000.000	1.720.861.553	2,99%
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	78.740.900.000	14.850.193.780	18,86%
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	71.858.100.000	4.547.171.186	6,33%
4	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500.000	3.105.090.448	13,66%
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	147.402.651.000	25.764.072.605	17,48%
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.600.000.000	255.301.245	2,97%
Total		386.899.151.000	50.242.690.817	12,99%

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi sampai dengan Maret 2024

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2024 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja.

Terdapat perubahan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga tidak selaras dengan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020 – 2024, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target	
			Renstra	PK
1	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	USD miliar	7,66	7,2
2	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	Kg/kap	61,02	59
3	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	6,1	9
4	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	Indeks	58	71,9
5	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	Rp. Triliun	3,9	8,8
6	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	-	10,26
7	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	Orang	-	66.000
8	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	indeks	104,5	104,75

*Indikator kinerja belum tercantum dalam Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada Triwulan I tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 104,69.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I tahun 2024, terdapat 2 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 32 Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Sebagai contoh, Total nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS hingga Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 3,65% menjadi USD 462,91 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau sebesar USD 480,45 juta. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor perikanan Indonesia ke AS tahun 2022 sebesar USD 727,27 juta pada periode yang sama, dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi di pasar AS belum sepenuhnya pulih: 	<ul style="list-style-type: none"> Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial; Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan protocol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA); Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping. Koordinasi Perundingan lainnya dalam rangka perluasan akses pasar dan penanganan hambatan ekspor
Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	<ul style="list-style-type: none"> Akses pembiayaan yang sulit karena pelaku usaha belum bankable dalam kelayakan usaha; Masih minimnya informasi tentang calon debitur potensial. 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan; Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah; Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data kusuka dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada Triwulan I tahun 2024 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2024 antara lain :

Tabel 33 Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

No	R ekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2024
1	<ul style="list-style-type: none"> Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial salah satunya yaitu keikutsertaan dalam pameran seafood expo North America pada tanggal 10-12 Maret 2024; Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan protocol perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) yang telah disepakati pada 16 Desember 2023 yaitu proses legal scrubbing untuk penyamaan konteks bahasa hukum. Setelah proses tersebut selesai, akan dilakukan proses penerjemahan dan ratifikasi di parlemen sesuai prosedur masing-masing negara; Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping. 	<ul style="list-style-type: none"> Berpartisipasi dalam pameran internasional untuk memperluas pasar ekspor di pasar prospektif dan potensial salah satunya yaitu keikutsertaan dalam pameran <i>seafood expo North America</i> pada tanggal 10 s.d 12 Maret 2024. Nilai potensi transaksi yang dihasilkan dalam pameran tersebut adalah sebesar USD 58,47 juta atau 17% di atas target yang ditetapkan sebesar USD 50 Juta dengan produk yang diminati diantaranya adalah tuna (loin, frozen, saku), udang (breaded, frozen), octopus, barramundi, cumi, kakap, tilapia, mahi mahi, dan ikan lainnya. Koordinasi dalam rangka membahas draft Operational Procedure Protokol Perubahan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 19 dan 24 Januari 2024, serta 21 Maret 2024. Diharapkan dengan disepakatinya Protokol Perubahan IJEPA ini dapat meningkatkan akses pasar tuna kaleng Indonesia ke Jepang yang saat ini masih dikenakan tarif 9,6%. Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping. Hasil keputusan Preliminary Negative Determination Investigasi CVD produk udang pada tanggal 25 Maret 2024 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan subsidi yang dilarang kepada produsen dan eksportir udang beku Indonesia dengan nilai de minimis. Ketentuan pengenaan bea masuk anti-subsidi ini akan berlaku apabila telah ada keputusan U.S. International Trade Commission (USITC) yang menyatakan terdapat kausalitas antara injury udang domestik AS disebabkan udang impor. Jika tidak ada kausalitas, maka pengenaan Bea masuk anti-subsidi tersebut tidak berlaku.
2	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Keuangan Perbankan dan non bank serta BLU LPMUKP; 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Kelompok Kerja Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang melibatkan eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator bidang perekonomian, Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Keuangan Perbankan dan non bank serta BLU LPMUKP; Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan;

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2024
	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Dinas KP Provinsi dalam rangka peningkatan fasilitasi akses pembiayaan kredit program sektor kelautan dan perikanan; • Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah; • Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data kusuka dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan dan Gisela berbasis wilayah dengan komoditas perikanan unggulan di daerah; • Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengintegrasikan debitur potensial berbasis data kusuka dengan lembaga pembiayaan Bank/Non Bank.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi terkait sinkronisasi penginputan target dan data capaian output berdasarkan secara berkala; • Koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran baik fisik maupun nonfisik; • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana penarikan dana pada lembar III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran dan menyusun prognosa realisasi anggaran sampai dengan Desember 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keikutsertaan dalam rapat peningkatan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dalam hal pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi lembar III DIPA. • Koordinasi dalam penginputan Capaian Output secara berkala; • Pembahasan revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyesuaian RPD (halaman III DIPA) Sekretariat Ditjen PDSPKP; • Keikutsertaan dalam evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2024
4	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak melalui rapat koordinasi dan pemantauan di lapangan dan mengkoordinasikan dokumen pendukung perencanaan kegiatan yang melalui tender; • Menyusun Laporan Penyelenggaraan PBJ secara berkala; • Meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan PBJ T-1, maupun pelaksanaan hasil pengadaan/tender Tahun 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan tahunan PBJ lingkup Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 17 s.d. 18 Januari 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong Kabupaten Bogor. • Updating Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 29 dan 30 Januari, 13,15 dan 16 Februari 2024 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat. • Brainstorming Percepatan PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 12 Februari 2024 di Jakarta. • Menyusun Laporan Penyelenggaraan PBJ secara berkala • Koordinasi dalam rangka Rapat Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024
5	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan mitigasi risiko terhadap kegiatan prioritas khususnya kegiatan yang diserahkan kepada Masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah melakukan penyusunan dokumen manajemen risiko pada kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP tahun 2024 dan melakukan pemantauan atas pemantauan dokumen manajemen risiko tahun 2023 • Telah melakukan penyusunan dokumen manajemen risiko pada kegiatan prioritas Ditjen PDSPKP tahun

No	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Triwulan I Tahun 2024
	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan koordinasi dengan PT. Perindo dalam penyewaan asset Ditjen PDSPKP;• Melakukan pengendalian terhadap pertanggungjawaban Ditjen PDSPKP agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2024 dan melakukan pemantauan atas pemantauan dokumen manajemen risiko tahun 2023